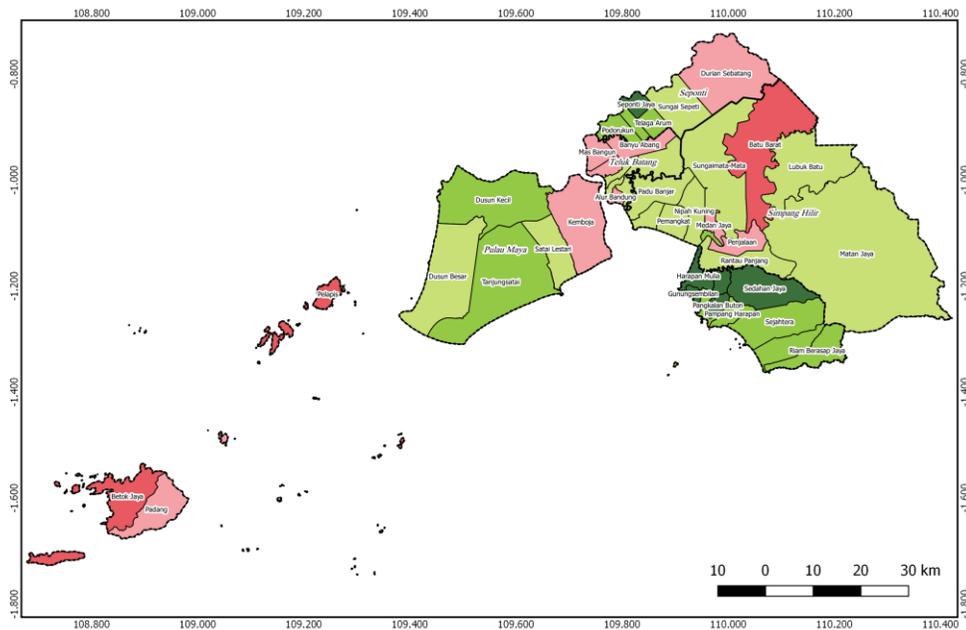




LAPORAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

TAHUN 2023



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAYONG UTARA**



SAMBUTAN BUPATI KAYONG UTARA



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*, Tahun 2023.

Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Selain itu pangan merupakan komoditi dagang yang sangat berperan dalam kehidupan ekonomi. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia cukup serta terjangkau oleh daya beli masyarakat merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*, adalah Pelaksanaan UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun serta mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, salah satu mekanisme dimaksud dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*.

Manfaat Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* sebagai informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan terutama dalam upaya perlindungan dari krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang pada daerah rawan pangan dan penanganan daerah tertinggal. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dilaksanakannya kegiatan ini dengan tujuan data yang disusun diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam merencanakan program, penentuan sasaran prioritas utama serta intervensi kerawanan pangan dan gizi.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dinyatakan telah selesai disusun, saran dan kritik yang membangun kami harapkan dalam rangka penyempurnaan buku FSVA ini.

Sukadana, Desember 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA



ROMI WIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten Kayong Utara dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus berkomitmen menjaga Ketahanan Pangan di daerah. Berdasarkan konsep Ketahanan Pangan dan Gizi terdapat 3 Pilar utama Ketahanan Pangan yaitu Pilar Ketersediaan Pangan, Pilar Keterjangkauan Pangan dan Pilar Pemanfaatan Pangan. Oleh karena itu dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) sebagai instrumen untuk pemantauan ketahanan pangan wilayah.

Peta ini disusun atas hasil kerjasama yang baik antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara melalui Bidang Ketahanan Pangan dengan Badan Pangan Nasional serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dukungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, BPS Kabupaten Kayong Utara, Bappeda Litbang Kabupaten Kayong Utara, dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.

Dalam Penyusunan Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tentu masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang mendukung dalam penyusunan laporan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kayong Utara, kami berharap laporan ini dapat berguna dan memberikan masukan bagi stakeholder atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan.

Sukadana, Desember 2023
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
Kabupaten Kayong Utara

Ir. MALURU NURSALAM, MM
NIP.19671209 199703 1 004

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI	
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi 3
1.3.	Metodologi 6
2	KETERSEDIAAN PANGAN
2.1.	Lahan Pertanian 10
2.2.	Produksi Pangan 13
2.3.	Sarana dan Prasarana Ekonomi 18
2.4.	Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan 21
3	AKSES PANGAN
3.1.	Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga 23
3.2.	Akses Transportasi 26
3.4.	Strategi Peningkatan Akses Pangan 27
4	PEMANFAATAN PANGAN
4.1.	Akses Air Bersih 28
4.2.	Rasio Tenaga Kesehatan 31
4.3.	Dampak (Outcome) dari Status Kesehatan 32
4.4.	Strategi Pemenuhan Pangan 34
5	KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT
5.1.	Kondisi Ketahanan Pangan 37
5.2.	Faktor Penyebab Kerentanan Pangan 41
6	REKOMENDASI KEBIJAKAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 12 desa dari 43 desa (27,90%) yang terdiri dari 3 desa (6,98%) Prioritas 1; 9 desa (20,93%) Prioritas 2; dan tidak terdapat desa dengan prioritas 3. Desa prioritas 1 tersebar 2 desa di Kecamatan Kepulauan Karimata; dan 1 desa di Kecamatan Simpang Hilir. Desa prioritas 2 tersebar 4 desa di Kecamatan Teluk Batang; 2 desa di Kecamatan Simpang Hilir; 1 desa di Kecamatan Seponti; 1 Desa di Kecamatan Pulau Maya dan 1 Desa di Kecamatan Kepulauan Karimata.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan rendahnya hasil analisis data indeks komposit dengan nilai yang rendah. Berdasarkan sumber data yang dianalisis, sebagian besar desa prioritas 2 dan prioritas 3 tidak mempunyai luas lahan pertanian cukup yang menyebabkan rendahnya produksi pangan sektoral, kurangnya sarana dan prasarana penyedia pangan, akses jalan yang kurang memadai, banyaknya jumlah penduduk tidak sejahtera, dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
 - b. Penguatan kebijakan untuk mempertahankan ketersediaan lahan pertanian produktif untuk mengendalikan lajunya alih fungsi lahan pertanian, sosialisasi dan penyuluhan untuk peningkatan produksi pangan
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - d. Penambahan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyedia pangan
 - e. Peningkatan akses jalan yang memadai dan penyediaan fasilitas air bersih/air layak pakai
 - f. Penyediaan tenaga kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) desa dengan total penduduk sebesar 128.684 jiwa (BPS). Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sukadana (9 pulau), Kecamatan Simpang Hilir (2 pulau), Kecamatan Pulau Maya (9 pulau), dan Kecamatan Kepulauan Karimata (83 pulau). Dari 103 pulau kecil yang ada di Kabupaten Kayong Utara hanya 14 pulau yang sudah berpenghuni yaitu 3 pulau di Kecamatan Pulau Maya dan 11 pulau di Kecamatan Kepulauan Karimata. Secara geografis, Kabupaten Kayong Utara berada di sisi Selatan Propinsi Kalimantan Barat atau berada pada posisi 00 43' 5,15" Lintang Selatan sampai dengan 10 46' 35,21" Lintang Selatan dan 108 40' 58,88" Bujur Timur sampai dengan 110 24' 30,05" Bujur Timur. Untuk luas wilayah/ area di Kabupaten Kayong Utara adalah 4.568,26 Km². Luas wilayah ini relatif kecil jika dibandingkan wilayah Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Barat . Menurut (undang-undang RI No. 6 Tahun 2007 dan Surat Mendagri No. 135/439/SJ Tanggal 27 Februari 2007). Kabupaten Kayong Utara di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Selat Karimata, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Karimata dan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata. Kabupaten Kayong Utara memiliki wilayah daratan seluas 4.568,26 km² atau 4.568,26 ha dan wilayah perairan (Das) di Kecamatan Pulau Maya diperkirakan seluas 39,60 Km² , kecamatan Sukadana seluas 57,00 Km², kecamatan Simpang Hilir seluas 122,00 Km², Kecamatan Teluk Batang seluas 68,00 Km², kecamatan seponi seluas 154,4 Km² sedangkan untuk Kecamatan Kepulauan Karimata tidak memiliki data Das. Secara klimatologis, Kabupaten Kayong Utara memiliki pola tipe curah hujan tipe sedang. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Kayong Utara tahun 2022 adalah 363,8 mm dengan jumlah hari hujan 26,6 hari lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Curah Hujan tertinggi terjadi di bulan Oktober 695,9 mm dan terendah dibulan Maret 167,9 mm.

Perekonomian Kabupaten Kayong Utara tergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2022 peranannya turun dari 28,62 % menjadi 28,29 %. Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor yang mengalami penurunan tahun 2022 adalah sektor konstruksi, yaitu dari 12,59 % menjadi 12,31 %; sektor pertambangan dari 4,48 % menjadi 4,26 %; dan sektor jasa keuangan dan asuransi dari 2,00 % menjadi 1,97%. Sementara sektor lainnya

mengalami peningkatan. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan peranan sebesar 12,94 %, sektor industri pengolahan sebesar 10,17 %, dan sektor lainnya yang memiliki *share* dibawah 5 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

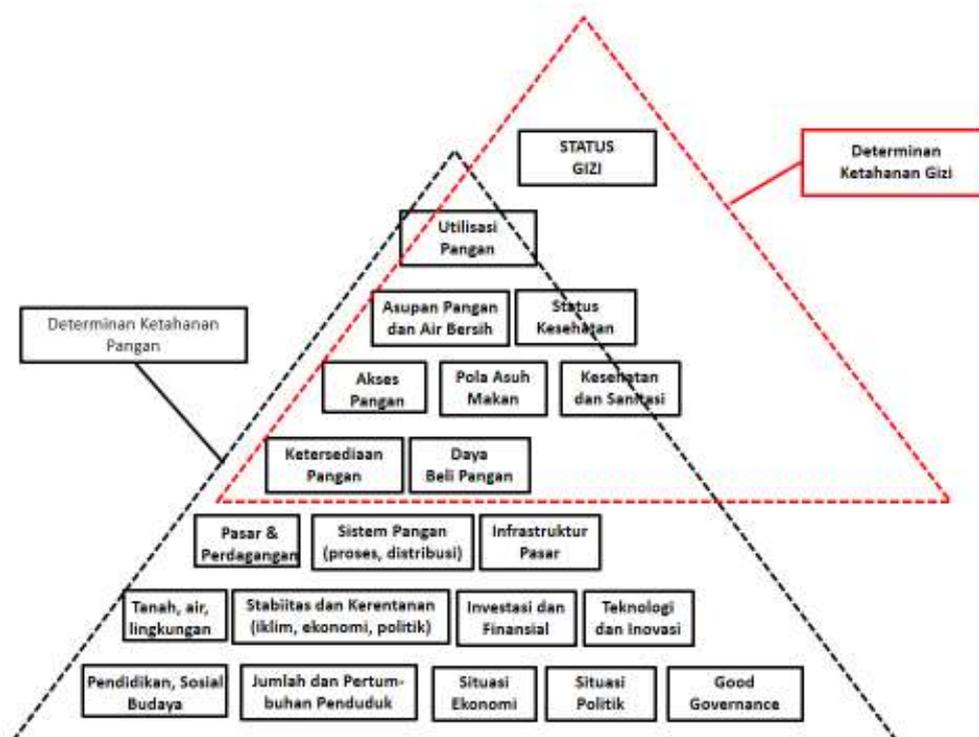
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan

sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	Perbup LP2B Kayong Utara 2022
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2021, BPS
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 2022, Bappedalitbang

Indikator	Definisi	Sumber Data
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2021, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK Januari/2019)
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinas Kesehatan dan KB, Kabupaten Dalam Angka 2023, BPS

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- a_i : Bobot masing-masing indikator
- X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot

indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^n \alpha_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan¹. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 43 desa di Kabupaten Kayong Utara, 10 desa masuk dalam prioritas 1 (23,25%), 5 desa prioritas 2 (11,63 %) dan 8 desa prioritas 3 (18,60%). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Simpang Hilir yaitu sebanyak 3 desa dan Kecamatan Kepulauan Karimata sebanyak 3 desa, Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Seponti masing-masing sebanyak 2 desa.

¹ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

Tabel 2.1.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

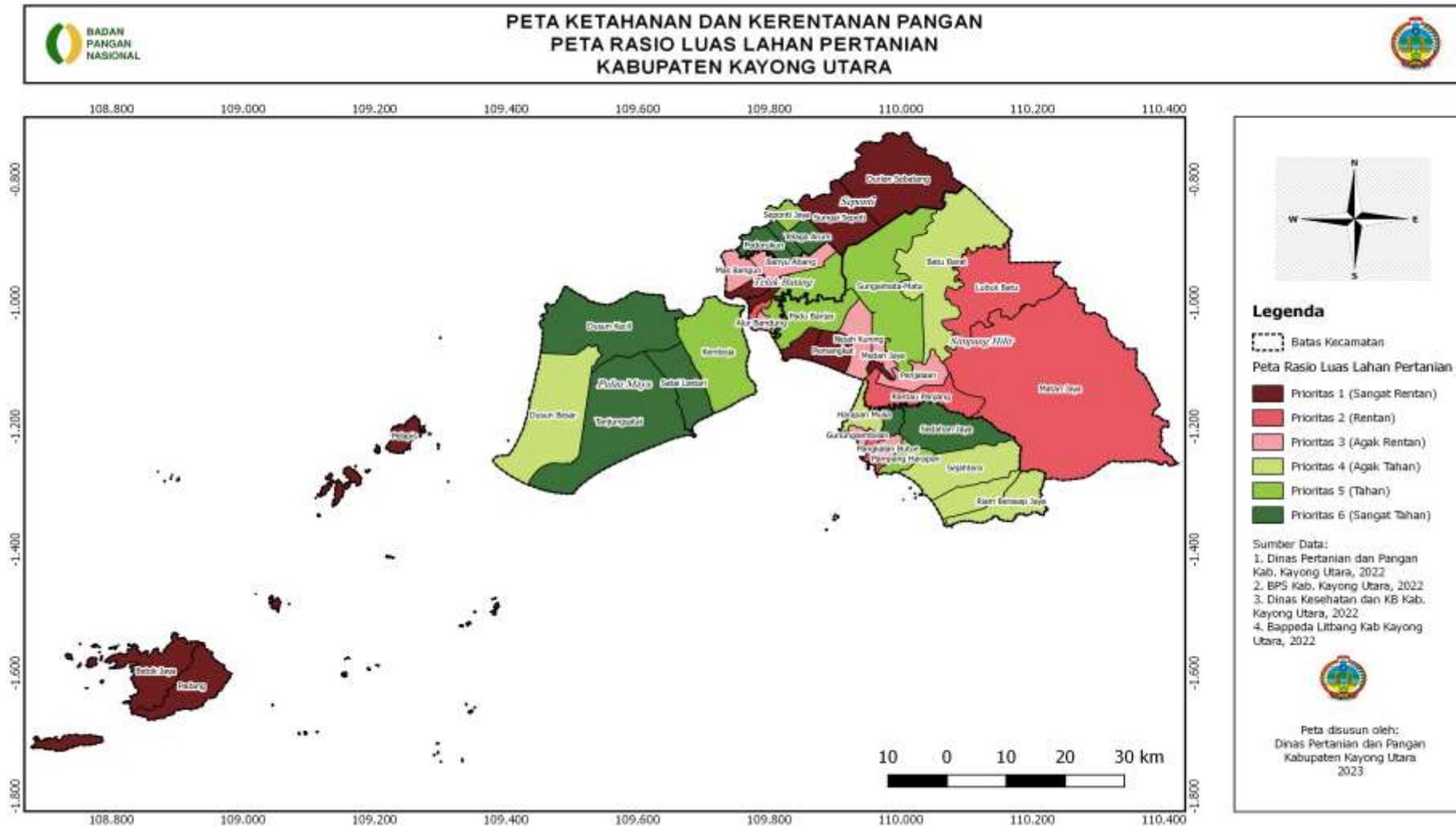
Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	<=0,0006	10	23,26 %
2	0,0006 – 0,0119	5	11,62 %
3	0,0119 – 0,0442	8	18,60 %
4	0,0442 – 0,0689	6	13,95 %
5	0,0689 – 0,1310	6	13,95 %
6	>0,1310	8	18,60 %

Adapun rincian prioritas rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1.2 Sebaran prioritas rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan per desa

No.	Nama Kec	Kode Desa	Nama Desa	Prioritas Lahan
1	SUKADANA	6111012001	SUTRA	2
2	SUKADANA	6111012002	PANGKALAN BUTON	3
3	SUKADANA	6111012003	SEJAHTERA	4
4	SUKADANA	6111012004	SIMPANG TIGA	4
5	SUKADANA	6111012005	BENAWAI AGUNG	6
6	SUKADANA	6111012006	HARAPAN MULIA	4
7	SUKADANA	6111012007	PAMPANG HARAPAN	5
8	SUKADANA	6111012008	SEDAHAN JAYA	6
9	SUKADANA	6111012009	GUNUNG SEMBILAN	3
10	SUKADANA	6111012010	RIAM BERASAPJAYA	4
11	SIMPANG HILIR	6111022001	TELUK MELANO	1
12	SIMPANG HILIR	6111022002	NIPAH KUNING	3
13	SIMPANG HILIR	6111022003	PEMANGKAT	1
14	SIMPANG HILIR	6111022004	PADU BANJAR	5
15	SIMPANG HILIR	6111022005	PENJALAAN	3
16	SIMPANG HILIR	6111022006	SUNGAI MATA-MATA	5
17	SIMPANG HILIR	6111022007	BATU BARAT	4
18	SIMPANG HILIR	6111022008	PULAU KUMBANG	1
19	SIMPANG HILIR	6111022009	RANTAU PANJANG	2
20	SIMPANG HILIR	6111022010	MATAN JAYA	2
21	SIMPANG HILIR	6111022011	MEDAN JAYA	3
22	SIMPANG HILIR	6111022012	LUBUK BATU	2
23	TELUK BATANG	6111032001	MAS BANGUN	3
24	TELUK BATANG	6111032002	ALUR BANDUNG	3
25	TELUK BATANG	6111032003	TELUK BATANG	1
26	TELUK BATANG	6111032004	SUNGAI PADUAN	5
27	TELUK BATANG	6111032005	BANYU ABANG	3
28	TELUK BATANG	6111032006	TELUK BATANG SELATAN	2
29	TELUK BATANG	6111032007	TELUK BATANG UTARA	1
30	PULAU MAYA	6111042001	TANJUNG SATAI	6
31	PULAU MAYA	6111042002	KEMBOJA	5
32	PULAU MAYA	6111042003	DUSUN KECIL	6
33	PULAU MAYA	6111042004	DUSUN BESAR	4
34	PULAU MAYA	6111042006	SATAI LESTARI	6
35	SEPONTI	6111052001	SEPONTI JAYA	5
36	SEPONTI	6111052002	TELAGA ARUM	6
37	SEPONTI	6111052003	WONOREJO	6
38	SEPONTI	6111052004	PODO RUKUN	6
39	SEPONTI	6111052005	SUNGAI SEPETI	1
40	SEPONTI	6111052006	DURIAN SEBATANG	1
41	KEPULAUAN KARIMATA	6111062001	PELAPIS	1
42	KEPULAUAN KARIMATA	6111062002	BETOK JAYA	1
43	KEPULAUAN KARIMATA	6111062003	PADANG	1

Gambar 2.1.1 Peta Rasio Luas Lahan



2.2. PRODUKSI

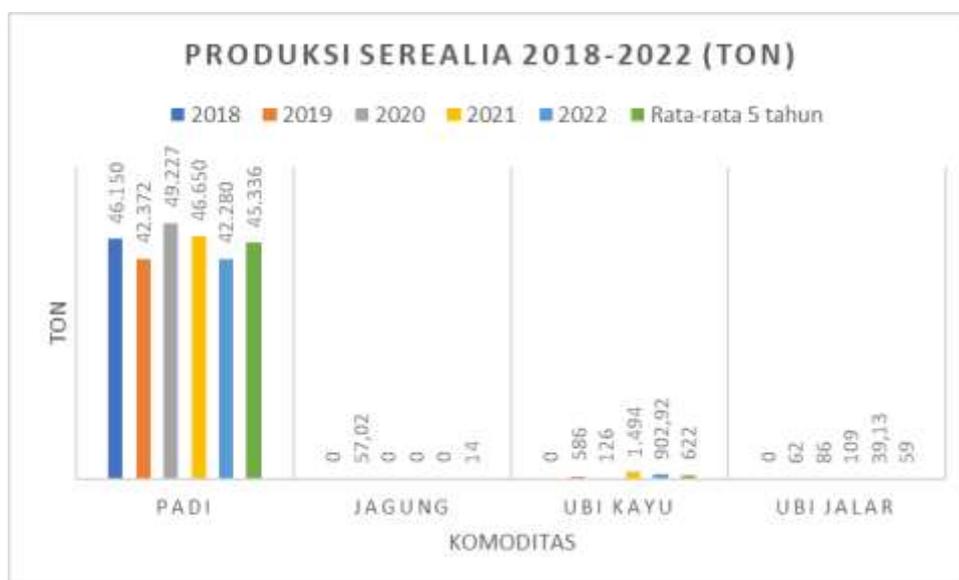
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 28,29 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2022 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi merupakan bahan pokok di Kabupaten Kayong Utara yang menyumbang sebesar 98 % dari total produksi serealida kabupaten dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Kayong Utara mengalami penurunan sejak tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan penurunan produktivitas. Produksi padi mengalami peningkatan dan penurunan selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 46.150 ton tahun 2018, menurun menjadi 42.375 ton tahun 2019 ,meningkat lagi menjadi 49.227 ton tahun 2020, pada tahun 2021 menurun lagi menjadi 46.650 ton sehingga pada kondisi tahun 2022 turun lagi menjadi 42.280 ton.

Tabel 2.2.1 Produksi Serealida Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)

Serealida	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata 5 tahun
Padi	46.150	42.372	49.227	46.650	42.280	45.336
Jagung	0	57,02	12.41	0	0	14
Ubi Kayu	0	586	126	1.494	902,92	622
Ubi Jalar	0	62	86	109	39,13	59

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018-2023, BPS

Gambar 2.2.1 Produksi Serealida Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)



Tahun 2022, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 42.280 ton padi, 902,92 ton ubi kayu, 39,13 ton ubi jalar, untuk jagung tidak ada produksi.

Sebaran total produksi sereal selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 49.227 ton dan terkecil pada tahun 2022.

Produksi sereal pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2 Produksi Total Sereal per Tahun (2018-2022)

Kecamatan	Produksi Total Sereal					Rata-rata 5 Tahun
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Sukadana	17.849	16.315	19.110	18.458	18.355	18.017
2. Simpang Hilir	10.100	8.998	10.541	6.583	6.375	8.519
3. Teluk Batang	3.825	3.567	4.230	5.901	3.713	4.247
4. Seponti	4.739	4.514	5.495	9.326	9.445	6.704
5. Pulau Maya	10.644	9.686	11.205	7.985	5.457	8.995
Jumlah	47.158	43.079	50.581	48.253	43.344	46.483

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018-2022, BPS

Gambar. 2.2.2 Grafik Produksi Sereal Tahun 2018-2022



Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kayong Utara selama 5 tahun terakhir (2018-2022) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.2.3 Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2020 di 2 kecamatan. Peningkatan terjadi di Kecamatan Sukadana

dan Kecamatan Pulau Maya. Produksi padi tertinggi di Kecamatan Sukadana sebesar 18.948 ton pada tahun 2020

Tabel 2.2.3 Produksi Padi 2018 - 2022 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Sukadana	17.650	16.206	18.948	18.300	18.280
2. Simpang Hilir	9.710	8.916	10.316	6.433	6.279
3. Teluk Batang	3.715	3.411	3.947	5.412	3.293
4. Seponti	4.615	4.237	4.903	8.610	8.972
5. Pulau Maya	10.460	9.604	11.113	7.895	5.457
6. Kepulauan Karimata	-	-	-	-	-
Jumlah	46.150	42.372	49.227	46.650	42.280

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2014-2018, BPS

Grafik 2.2.3 Produksi Padi 2018-2022 (Ton)



Jagung

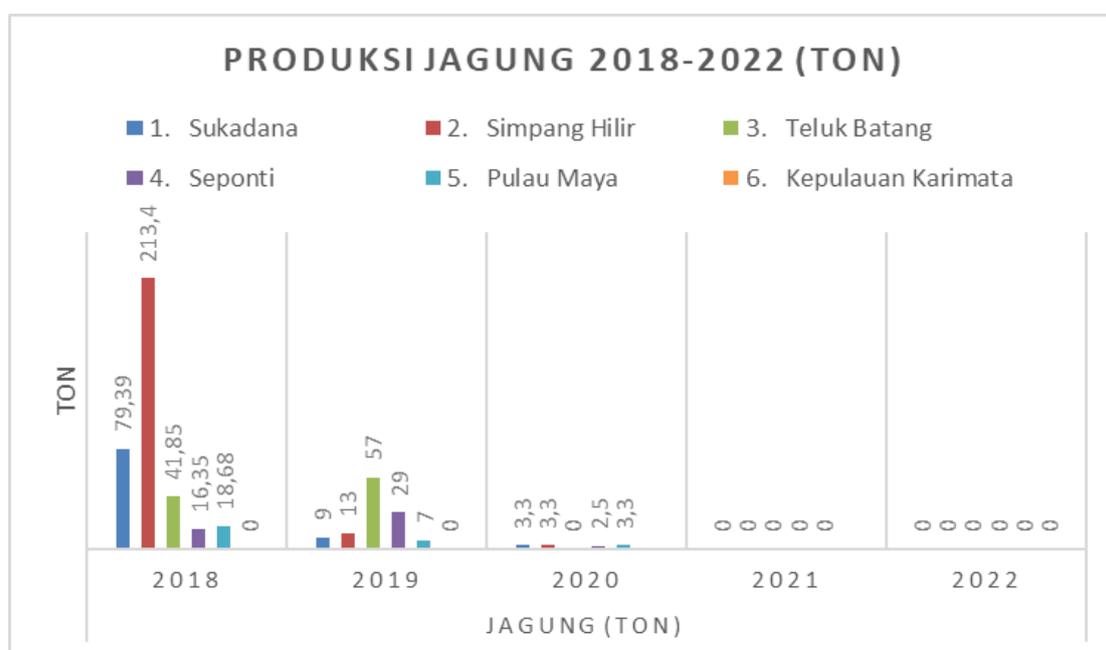
Pada tahun 2021 dan 2022, tidak ada produksi jagung. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan produksi yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 369,67 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Simpang Hilir sebesar 213,4 ton, menyusul Kecamatan Sukadana sebesar 79,39 ton dan terendah Kecamatan Seponti sebesar 16,35 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.2.4

Tabel 2.2.4 Produksi Jagung 2018 - 2022 (Ton)

Kabupaten	Jagung (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Sukadana	79,39	9	3,3	0	0
2. Simpang Hilir	213,4	13	3,3	0	0
3. Teluk Batang	41,85	57	0	0	0
4. Seponti	16,35	29	2,5	0	0
5. Pulau Maya	18,68	7	3,3	0	0
6. Kepulauan Karimata	-	-			-
Jumlah	369,67	115	12,4	0	0

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018-2022, BPS

Grafik 2.2.4 Produksi Jagung 2018-2022 (Ton)



Ubi Kayu

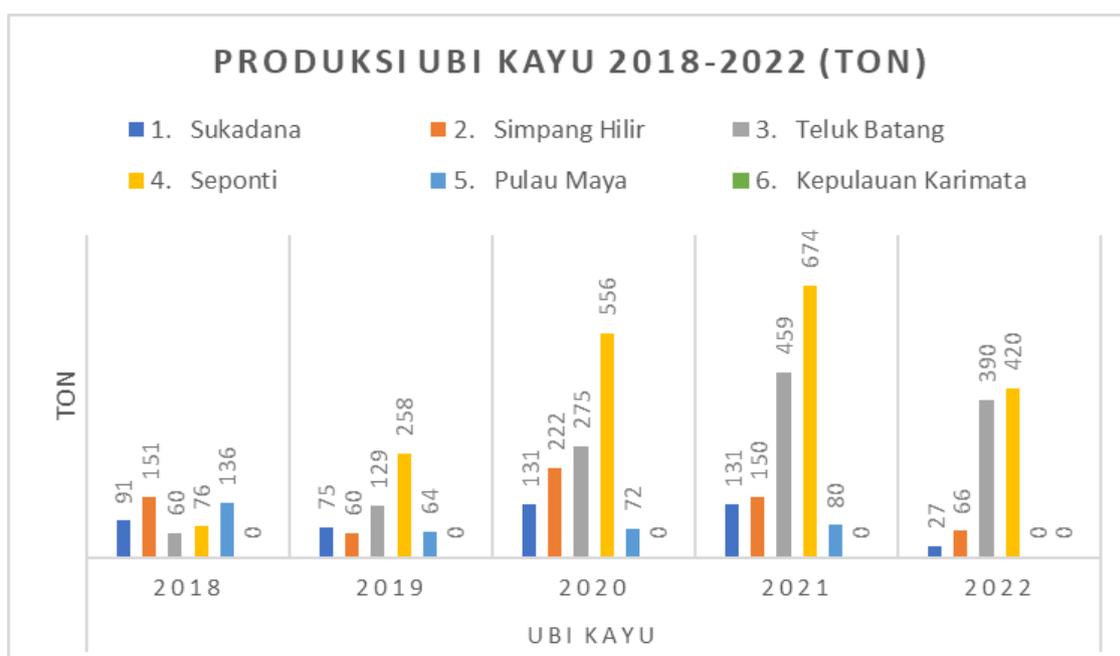
Produksi ubi kayu menurun dari 1.494 ton pada tahun 2021 menjadi 903 ton pada tahun 2022. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2022 meliputi Kecamatan Seponti dan Kecamatan Teluk Batang. Rincian produksi ubi kayu tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 2.2.5.

Tabel 2.2.5 Produksi Ubi Kayu 2018 - 2022 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Sukadana	91	75	131	131	27
2. Simpang Hilir	151	60	222	150	66
3. Teluk Batang	60	129	275	459	390
4. Seponti	76	258	556	674	420
5. Pulau Maya	136	64	72	80	0
6. Kepulauan Karimata	-	-	-	-	-
Jumlah	514	586	1.256	1.494	903

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018-2022, BPS

Grafik 2.2.5 Produksi Ubi Kayu 2018-2022 (Ton)



Ubi Jalar

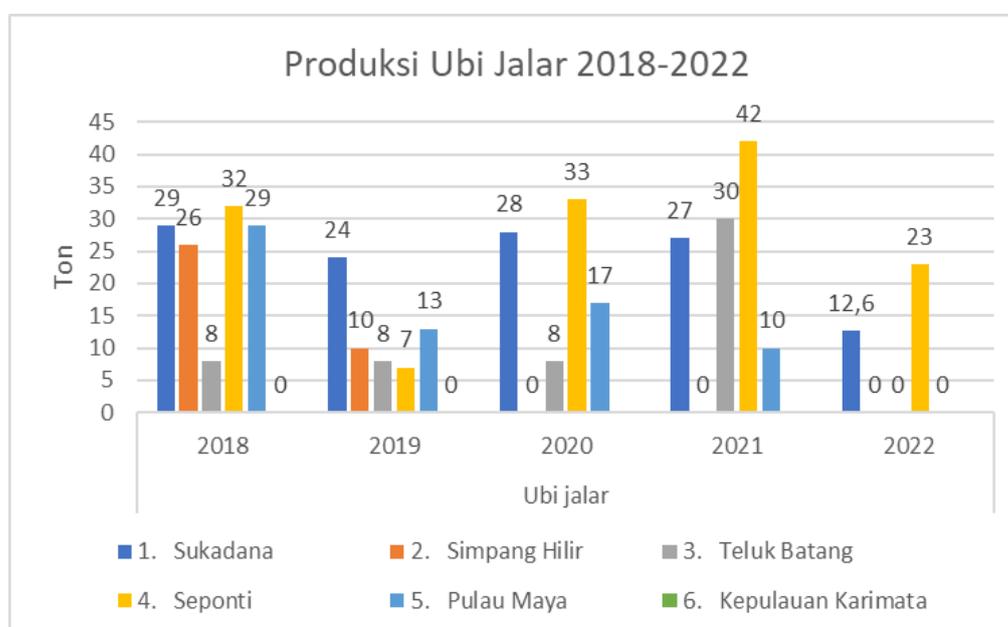
Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2018 - 2022) terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 124 ton. Kecamatan Seponti merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 32 ton, Kecamatan Sukadana dan Pulau Maya sebesar 29 ton, Kecamatan Simpang Hilir sebesar 26 ton dan Kecamatan Teluk Batang sebesar 8 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2018 - 2022 disajikan pada Tabel 2.2.6

Tabel 2.2.6 Produksi Ubi Jalar 2018 - 2022 (Ton)

Kabupaten	Ubi jalar				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Sukadana	29	24	28	27	12,6
2. Simpang Hilir	26	10	0	0	0
3. Teluk Batang	8	8	8	30	0
4. Seponti	32	7	33	42	23
5. Pulau Maya	29	13	17	10	0
6. Kepulauan Karimata	-	-	-	-	-
Jumlah	124	62	86	109	35,6

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2014-2018, BPS

Grafik 2.2.6 Produksi Ubi Jalar 2018-2022



2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 43 desa di Kabupaten Kayong Utara, 4 desa masuk dalam prioritas 1 (9,30 %), 7 desa prioritas 2 (16,28 %), dan 3 desa prioritas 3 (6,98 %).

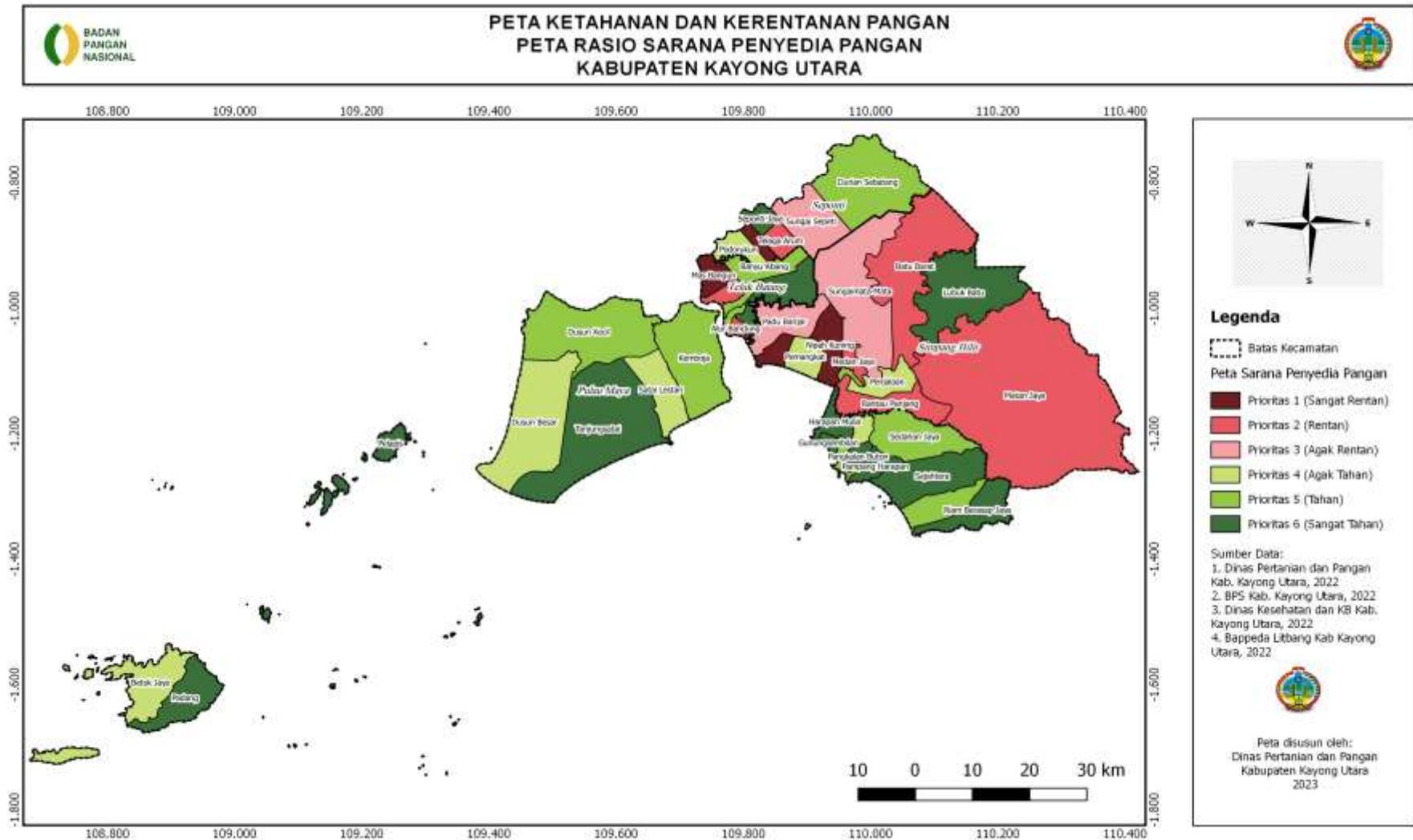
Tabel 2.2.7 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	Prioritas 1	<= 0,0262	4	9,30 %
2	Prioritas 2	0,0262 – 0,0396	7	16,28 %
3	Prioritas 3	0,0396 – 0,0487	3	6,98 %
4	Prioritas 4	0,0487 – 0,0560	7	16,28 %
5	Prioritas 5	0,0560 – 0,0684	10	23,25 %
6	Prioritas 6	> 0,0684	12	27,90 %

Tabel 2.2.8 Sebaran per desa rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	Prioritas Sarana dan Prasarana Pangan
1	SUKADANA	6111020	6111012001	SUTRA	5
2	SUKADANA	6111020	6111012002	PANGKALAN BUTON	6
3	SUKADANA	6111020	6111012003	SEJAHTERA	6
4	SUKADANA	6111020	6111012004	SIMPANG TIGA	5
5	SUKADANA	6111020	6111012005	BENAWAI AGUNG	4
6	SUKADANA	6111020	6111012006	HARAPAN MULIA	6
7	SUKADANA	6111020	6111012007	PAMPANG HARAPAN	6
8	SUKADANA	6111020	6111012008	SEDAHAN JAYA	5
9	SUKADANA	6111020	6111012009	GUNUNG SEMBILAN	6
10	SUKADANA	6111020	6111012010	RIAM BERASAPJAYA	6
11	SIMPANG HILIR	6111030	6111022001	TELUK MELANO	5
12	SIMPANG HILIR	6111030	6111022002	NIPAH KUNING	1
13	SIMPANG HILIR	6111030	6111022003	PEMANGKAT	4
14	SIMPANG HILIR	6111030	6111022004	PADU BANJAR	3
15	SIMPANG HILIR	6111030	6111022005	PENJALAN	4
16	SIMPANG HILIR	6111030	6111022006	SUNGAI MATA-MATA	3
17	SIMPANG HILIR	6111030	6111022007	BATU BARAT	2
18	SIMPANG HILIR	6111030	6111022008	PULAU KUMBANG	1
19	SIMPANG HILIR	6111030	6111022009	RANTAU PANJANG	2
20	SIMPANG HILIR	6111030	6111022010	MATAN JAYA	2
21	SIMPANG HILIR	6111030	6111022011	MEDAN JAYA	2
22	SIMPANG HILIR	6111030	6111022012	LUBUK BATU	6
23	TELUK BATANG	6111040	6111032001	MAS BANGUN	1
24	TELUK BATANG	6111040	6111032002	ALUR BANDUNG	2
25	TELUK BATANG	6111040	6111032003	TELUK BATANG	5
26	TELUK BATANG	6111040	6111032004	SUNGAI PADUAN	6
27	TELUK BATANG	6111040	6111032005	BANYU ABANG	5
28	TELUK BATANG	6111040	6111032006	TELUK BATANG SELATAN	5
29	TELUK BATANG	6111040	6111032007	TELUK BATANG UTARA	2
30	PULAU MAYA	6111010	6111042001	TANJUNG SATAI	6
31	PULAU MAYA	6111010	6111042002	KEMBOJA	5
32	PULAU MAYA	6111010	6111042003	DUSUN KECIL	5
33	PULAU MAYA	6111010	6111042004	DUSUN BESAR	4
34	PULAU MAYA	6111010	6111042006	SATAI LESTARI	4
35	SEPONTI	6111050	6111052001	SEPONTI JAYA	6
36	SEPONTI	6111050	6111052002	TELAGA ARUM	2
37	SEPONTI	6111050	6111052003	WONOREJO	1
38	SEPONTI	6111050	6111052004	PODO RUKUN	4
39	SEPONTI	6111050	6111052005	SUNGAI SEPETI	3
40	SEPONTI	6111050	6111052006	DURIAN SEBATANG	5
41	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062001	PELAPIS	6
42	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062002	BETOK JAYA	4
43	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062003	PADANG	6

Gambar 2.2.1 Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan berdasarkan skala prioritas



2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2020-2022 mencapai 1,99 % per tahun sementara produksi padi mengalami penurunan mencapai 9,36% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2019-2023 bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi; (ii) perluasan lahan sawah melalui indeks pertanaman.

Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan produksi melalui:
 - a. Penggunaan bibit unggul
 - b. Pengolahan tanah yang baik
 - c. Pemupukan secara teratur dan berimbang
 - d. Pemberantasan hama dan penyakit
 - e. Pengelolaan air

- (ii) Perluasan lahan sawah melalui peningkatan indeks pertanaman
 - a. Pengembangan lahan sawah
 - b. Optimalisasi penggunaan lahan
 - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara terus mengalami penurunan dari 9,33% (10.720 jiwa) tahun 2021 menjadi 9,04% (10.520 jiwa) tahun 2022

Tabel 3.1.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Kayong Utara

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk miskin	11,13 %	9,98	9,56	9,33	9,04

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, BPS

Pada tingkat desa berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022, terdapat 7 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 11 % (Prioritas 1). Sebanyak 7 desa (16,28%) masuk prioritas 2, dan 8 desa (18,60%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kayong Utara ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 22 desa tersebut.

Tabel 3.1.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

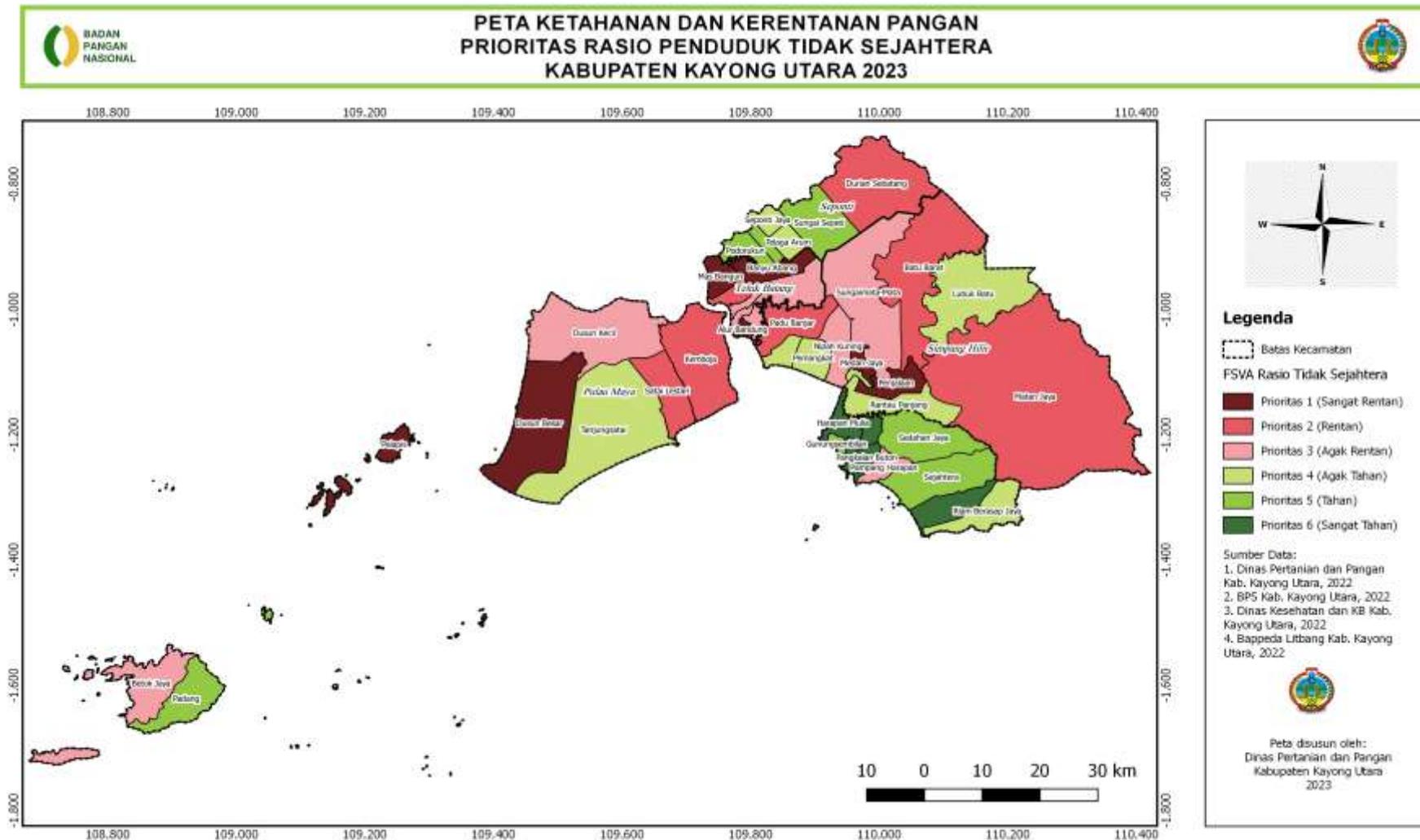
Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	>=0,1259	7	16,28%
2	0,1259 -<0,1904	7	16,28%
3	0,0977 -<0,1259	8	18,60%
4	0,0490 -<0,0977	9	20,93%
5	0,0196 -<0,0490	7	16,28%
6	<0,0196	5	11,63%

Berikut rincian sebaran desa berdasarkan skala prioritas

Tabel 3.1.3 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	Prioritas Penduduk Tdk Sejahtera
1	SUKADANA	6111020	6111012001	SUTRA	6
2	SUKADANA	6111020	6111012002	PANGKALAN BUTON	6
3	SUKADANA	6111020	6111012003	SEJAHTERA	5
4	SUKADANA	6111020	6111012004	SIMPANG TIGA	6
5	SUKADANA	6111020	6111012005	BENAWAI AGUNG	6
6	SUKADANA	6111020	6111012006	HARAPAN MULIA	6
7	SUKADANA	6111020	6111012007	PAMPANG HARAPAN	3
8	SUKADANA	6111020	6111012008	SEDAHAN JAYA	5
9	SUKADANA	6111020	6111012009	GUNUNG SEMBILAN	5
10	SUKADANA	6111020	6111012010	RIAM BERASAPJAYA	4
11	SIMPANG HILIR	6111030	6111022001	TELUK MELANO	4
12	SIMPANG HILIR	6111030	6111022002	NIPAH KUNING	3
13	SIMPANG HILIR	6111030	6111022003	PEMANGKAT	4
14	SIMPANG HILIR	6111030	6111022004	PADU BANJAR	2
15	SIMPANG HILIR	6111030	6111022005	PENJALAN	1
16	SIMPANG HILIR	6111030	6111022006	SUNGAI MATA-MATA	3
17	SIMPANG HILIR	6111030	6111022007	BATU BARAT	2
18	SIMPANG HILIR	6111030	6111022008	PULAU KUMBANG	4
19	SIMPANG HILIR	6111030	6111022009	RANTAU PANJANG	4
20	SIMPANG HILIR	6111030	6111022010	MATAN JAYA	2
21	SIMPANG HILIR	6111030	6111022011	MEDAN JAYA	1
22	SIMPANG HILIR	6111030	6111022012	LUBUK BATU	4
23	TELUK BATANG	6111040	6111032001	MAS BANGUN	1
24	TELUK BATANG	6111040	6111032002	ALUR BANDUNG	1
25	TELUK BATANG	6111040	6111032003	TELUK BATANG	3
26	TELUK BATANG	6111040	6111032004	SUNGAI PADUAN	3
27	TELUK BATANG	6111040	6111032005	BANYU ABANG	1
28	TELUK BATANG	6111040	6111032006	TELUK BATANG SELATAN	3
29	TELUK BATANG	6111040	6111032007	TELUK BATANG UTARA	2
30	PULAU MAYA	6111010	6111042001	TANJUNG SATAI	4
31	PULAU MAYA	6111010	6111042002	KEMBOJA	2
32	PULAU MAYA	6111010	6111042003	DUSUN KECIL	3
33	PULAU MAYA	6111010	6111042004	DUSUN BESAR	1
34	PULAU MAYA	6111010	6111042006	SATAI LESTARI	2
35	SEPONTI	6111050	6111052001	SEPONTI JAYA	4
36	SEPONTI	6111050	6111052002	TELAGA ARUM	4
37	SEPONTI	6111050	6111052003	WONOREJO	5
38	SEPONTI	6111050	6111052004	PODO RUKUN	5
39	SEPONTI	6111050	6111052005	SUNGAI SEPETI	5
40	SEPONTI	6111050	6111052006	DURIAN SEBATANG	2
41	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062001	PELAPIS	1
42	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062002	BETOK JAYA	3
43	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062003	PADANG	5

Gambar 3.1.1 Peta Sebaran Penduduk tidak Sejahtera Berdasarkan Skala Prioritas



3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021, BPS, di Kabupaten Kayong Utara, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) terdapat di Kecamatan Simpang Hilir (Desa Matan Jaya dan Desa Lubuk Batu) dan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun terdapat pada Kecamatan Kepulauan Karimata (Desa Padang, Desa Betok dan Desa Pelapis), Kecamatan Pulau Maya (Desa Kemboja, Desa Tanjung Satai, dan Desa Satai Lestari). Desa yang bisa

dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan terdapat di beberapa desa yang terbagi Kecamatan Seponti (Desa Sungai Sepeti dan Desa Durian Sebatang).

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Kayong Utara akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kayong Utara tahun 2019-2023 diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak¹. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

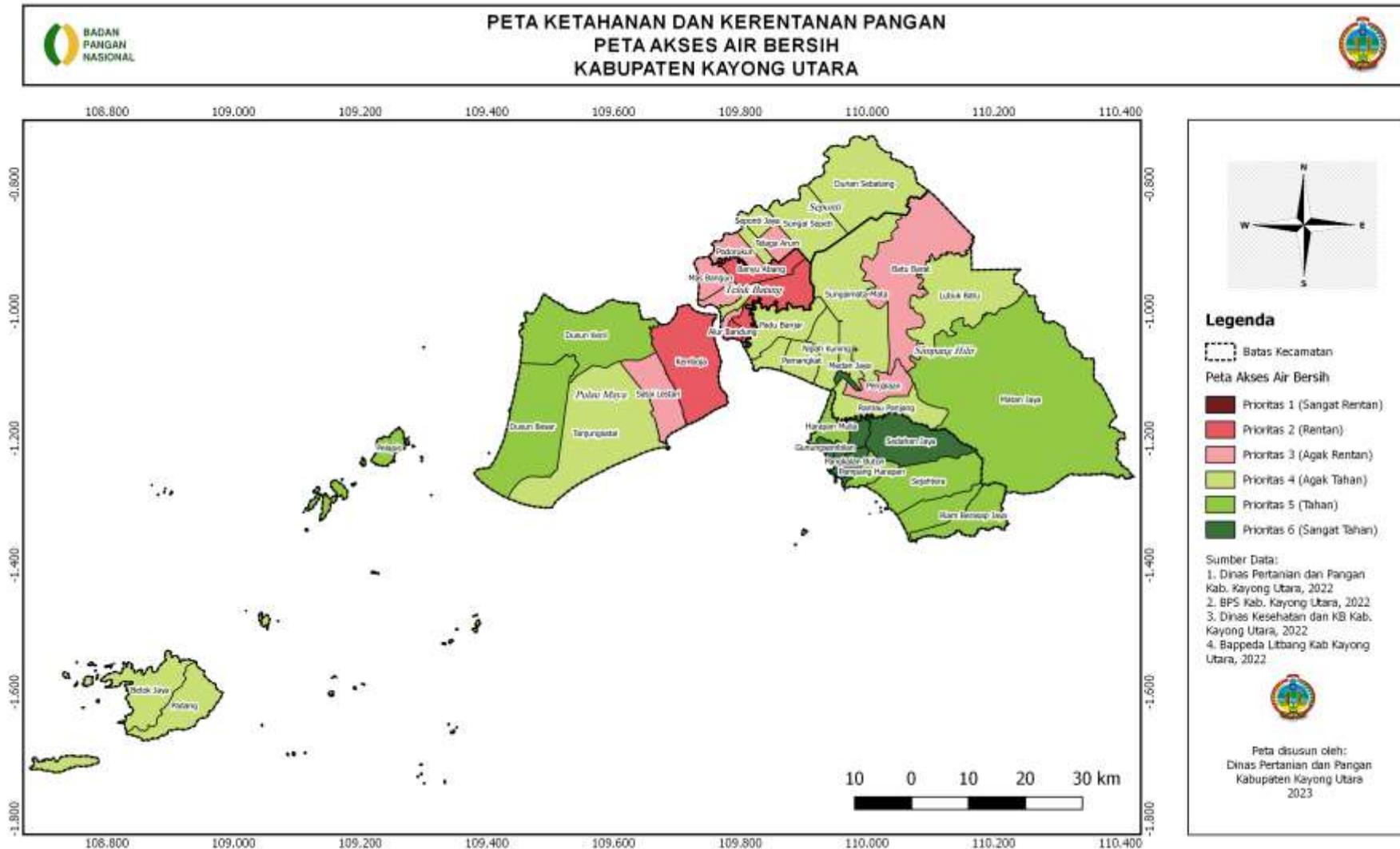
Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,7513$	-	-
2	0,5555 -< 0,7513	4	9,30 %
3	0,4525 -< 0,5555	8	18,60 %
4	0,2029 -< 0,4525	16	37,20 %
5	0,0172 -< 0,2029	9	20,93 %
6	< 0,0172	6	13,95 %

¹ Permenkes 416 Tahun 1990

Tabel 4.1.2 Rincian Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	Prioritas Akses Air Layak
1	SUKADANA	6111020	6111012001	SUTRA	6
2	SUKADANA	6111020	6111012002	PANGKALAN BUTON	6
3	SUKADANA	6111020	6111012003	SEJAHTERA	5
4	SUKADANA	6111020	6111012004	SIMPANG TIGA	5
5	SUKADANA	6111020	6111012005	BENAWAI AGUNG	6
6	SUKADANA	6111020	6111012006	HARAPAN MULIA	5
7	SUKADANA	6111020	6111012007	PAMPANG HARAPAN	5
8	SUKADANA	6111020	6111012008	SEDAHAN JAYA	6
9	SUKADANA	6111020	6111012009	GUNUNG SEMBILAN	6
10	SUKADANA	6111020	6111012010	RIAM BERASAPJAYA	5
11	SIMPANG HILIR	6111030	6111022001	TELUK MELANO	6
12	SIMPANG HILIR	6111030	6111022002	NIPAH KUNING	4
13	SIMPANG HILIR	6111030	6111022003	PEMANGKAT	4
14	SIMPANG HILIR	6111030	6111022004	PADU BANJAR	4
15	SIMPANG HILIR	6111030	6111022005	PENJALAN	3
16	SIMPANG HILIR	6111030	6111022006	SUNGAI MATA-MATA	4
17	SIMPANG HILIR	6111030	6111022007	BATU BARAT	3
18	SIMPANG HILIR	6111030	6111022008	PULAU KUMBANG	4
19	SIMPANG HILIR	6111030	6111022009	RANTAU PANJANG	4
20	SIMPANG HILIR	6111030	6111022010	MATAN JAYA	5
21	SIMPANG HILIR	6111030	6111022011	MEDAN JAYA	4
22	SIMPANG HILIR	6111030	6111022012	LUBUK BATU	4
23	TELUK BATANG	6111040	6111032001	MAS BANGUN	3
24	TELUK BATANG	6111040	6111032002	ALUR BANDUNG	2
25	TELUK BATANG	6111040	6111032003	TELUK BATANG	4
26	TELUK BATANG	6111040	6111032004	SUNGAI PADUAN	2
27	TELUK BATANG	6111040	6111032005	BANYU ABANG	2
28	TELUK BATANG	6111040	6111032006	TELUK BATANG SELATAN	3
29	TELUK BATANG	6111040	6111032007	TELUK BATANG UTARA	3
30	PULAU MAYA	6111010	6111042001	TANJUNG SATAI	4
31	PULAU MAYA	6111010	6111042002	KEMBOJA	2
32	PULAU MAYA	6111010	6111042003	DUSUN KECIL	5
33	PULAU MAYA	6111010	6111042004	DUSUN BESAR	5
34	PULAU MAYA	6111010	6111042006	SATAI LESTARI	3
35	SEPONTI	6111050	6111052001	SEPONTI JAYA	4
36	SEPONTI	6111050	6111052002	TELAGA ARUM	3
37	SEPONTI	6111050	6111052003	WONOREJO	4
38	SEPONTI	6111050	6111052004	PODO RUKUN	3
39	SEPONTI	6111050	6111052005	SUNGAI SEPETI	4
40	SEPONTI	6111050	6111052006	DURIAN SEBATANG	4
41	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062001	PELAPIS	5
42	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062002	BETOK JAYA	4
43	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062003	PADANG	4

Gambar 4.1.1 Peta Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas



4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

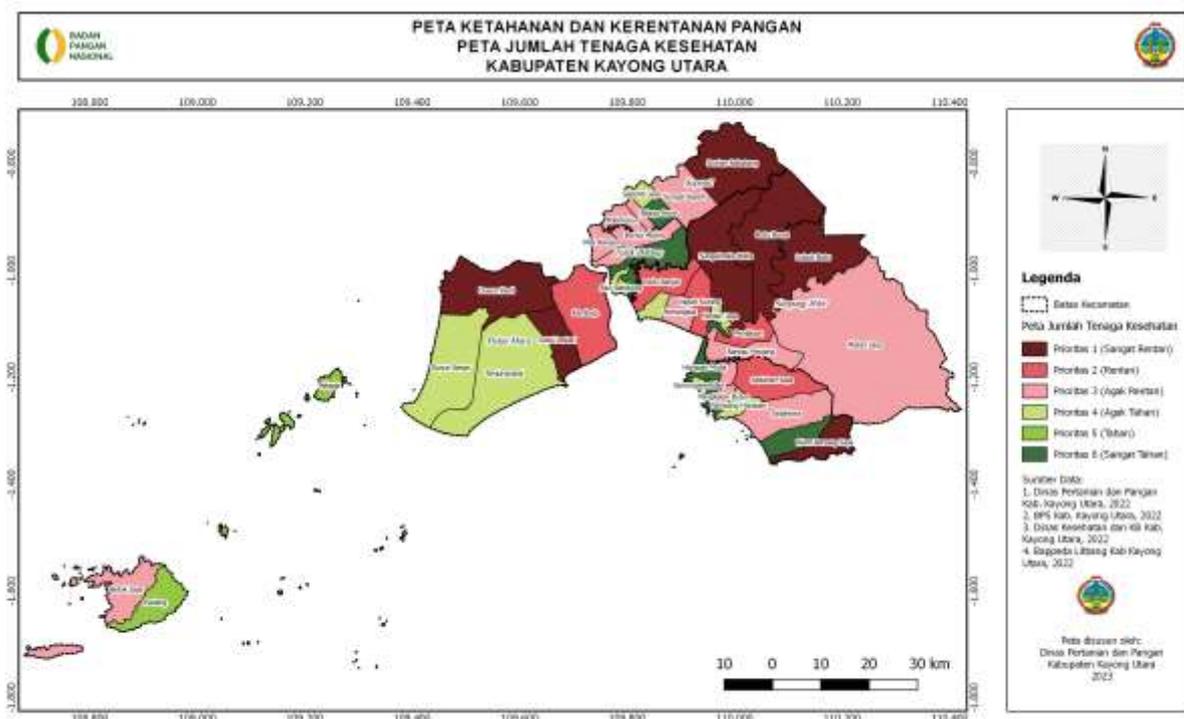
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2.1 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,7513$	7	16,28 %
2	0,5555 - $< 0,7513$	5	11,63 %
3	0,4525 - $< 0,5555$	13	30,23 %
4	0,2029 - $< 0,4525$	9	20,93 %
5	0,0172 - $< 0,2029$	2	4,65 %
6	$< 0,0172$	7	16,28 %

Gambar 4.2.1 Peta sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas



Tabel 4.2.1 Rincian desa berdasarkan rasio tenaga kesehatan berdasarkan skala prioritas

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	Prioritas Jumlah Tenkes
1	SUKADANA	6111020	6111012001	SUTRA	6
2	SUKADANA	6111020	6111012002	PANGKALAN BUTON	3
3	SUKADANA	6111020	6111012003	SEJAHTERA	3
4	SUKADANA	6111020	6111012004	SIMPANG TIGA	6
5	SUKADANA	6111020	6111012005	BENAWAI AGUNG	3
6	SUKADANA	6111020	6111012006	HARAPAN MULIA	6
7	SUKADANA	6111020	6111012007	PAMPANG HARAPAN	4
8	SUKADANA	6111020	6111012008	SEDAHAN JAYA	2
9	SUKADANA	6111020	6111012009	GUNUNG SEMBILAN	4
10	SUKADANA	6111020	6111012010	RIAM BERASAPJAYA	1
11	SIMPANG HILIR	6111030	6111022001	TELUK MELANO	6
12	SIMPANG HILIR	6111030	6111022002	NIPAH KUNING	2
13	SIMPANG HILIR	6111030	6111022003	PEMANGKAT	3
14	SIMPANG HILIR	6111030	6111022004	PADU BANJAR	2
15	SIMPANG HILIR	6111030	6111022005	PENJALAN	2
16	SIMPANG HILIR	6111030	6111022006	SUNGAI MATA-MATA	1
17	SIMPANG HILIR	6111030	6111022007	BATU BARAT	1
18	SIMPANG HILIR	6111030	6111022008	PULAU KUMBANG	4
19	SIMPANG HILIR	6111030	6111022009	RANTAU PANJANG	3
20	SIMPANG HILIR	6111030	6111022010	MATAN JAYA	3
21	SIMPANG HILIR	6111030	6111022011	MEDAN JAYA	4
22	SIMPANG HILIR	6111030	6111022012	LUBUK BATU	1
23	TELUK BATANG	6111040	6111032001	MAS BANGUN	3
24	TELUK BATANG	6111040	6111032002	ALUR BANDUNG	4
25	TELUK BATANG	6111040	6111032003	TELUK BATANG	6
26	TELUK BATANG	6111040	6111032004	SUNGAI PADUAN	6
27	TELUK BATANG	6111040	6111032005	BANYU ABANG	3
28	TELUK BATANG	6111040	6111032006	TELUK BATANG SELATAN	4
29	TELUK BATANG	6111040	6111032007	TELUK BATANG UTARA	3
30	PULAU MAYA	6111010	6111042001	TANJUNG SATAI	4
31	PULAU MAYA	6111010	6111042002	KEMBOJA	2
32	PULAU MAYA	6111010	6111042003	DUSUN KECIL	1
33	PULAU MAYA	6111010	6111042004	DUSUN BESAR	4
34	PULAU MAYA	6111010	6111042006	SATAI LESTARI	1
35	SEPONTI	6111050	6111052001	SEPONTI JAYA	4
36	SEPONTI	6111050	6111052002	TELAGA ARUM	6
37	SEPONTI	6111050	6111052003	WONOREJO	3
38	SEPONTI	6111050	6111052004	PODO RUKUN	3
39	SEPONTI	6111050	6111052005	SUNGAI SEPETI	3
40	SEPONTI	6111050	6111052006	DURIAN SEBATANG	1
41	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062001	PELAPIS	5
42	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062002	BETOK JAYA	3
43	KEPULAUAN KARIMATA	6111011	6111062003	PADANG	5

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan

3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2017-2021 sebanyak 53 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Sukadana (31 balita) dan Kecamatan Teluk Batang (9 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Pulau Maya (0 balita), dan Kecamatan Seponti (1 balita).

Tabel 4.3.1 Penderita Gizi Buruk 2017-2021

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sukadana	3	1	1	13	13
2	Simpang Hilir	-	-		4	3
3	Teluk Batang	2	1	2	3	1
4	Seponti	-	-		0	1
5	Pulau Maya	-	-		0	0
6	Kepulauan Karimata	1	-	3	0	1
	Total	6	2	6	20	19

Sumber : Dinkes dan KB Kayong Utara, 2021

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 adalah 0 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 1 jiwa. Angka kematian ibu saat melahirkan yaitu di Kecamatan Seponti (1 jiwa) Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.2 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Sukadana	-	-	-
2	Simpang Hilir	-	-	-
3	Teluk Batang	-	-	-
4	Seponti	-	1	1
5	Pulau Maya	-	-	-
6	Kepulauan Karimata	-	-	-
	Total	-	1	-

Sumber : Dinkes dan KB Kayong Utara, 2022

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Kayong Utara, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan an perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).
- Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.

- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganeekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
 - b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

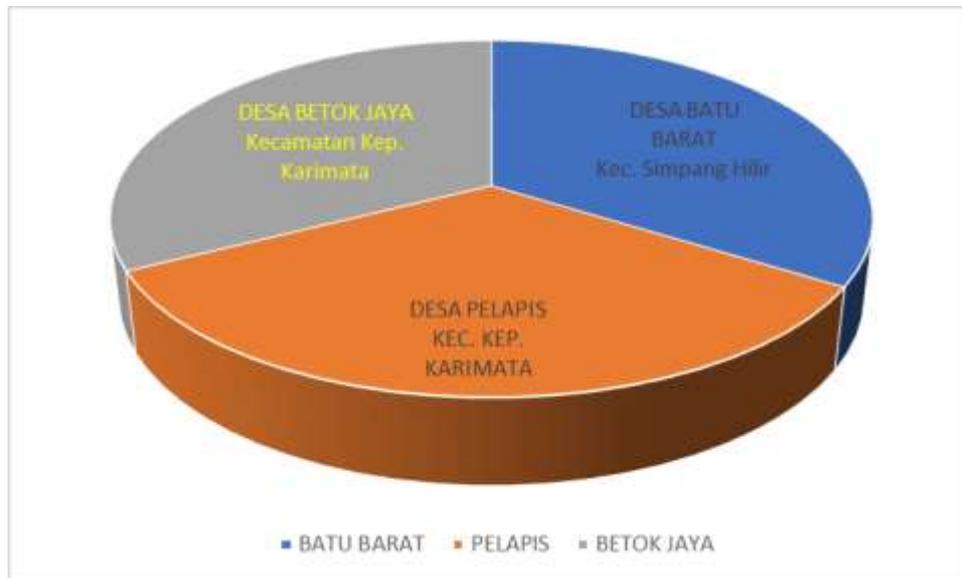
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 43 desa yang ada di Kabupaten Kayong Utara maka didapatkan tidak ada desa dengan Prioritas 1, 3 desa (Prioritas 2), 9 desa (Prioritas 3), 14 desa (Prioritas 4), 11 desa (Prioritas 5) dan 6 desa (Prioritas 6).

Tabel 5.1.1 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	-	-
2	3	6,97 %
3	9	20,93 %
4	14	32,56 %
5	11	25,58 %
6	6	13,95 %

jumlah Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 tidak ada, Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Simpang Hilir (1 desa), Kecamatan Kepulauan Karimata (2 desa) (Gambar 5.1.1).



Gambar 5.1.1 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 2

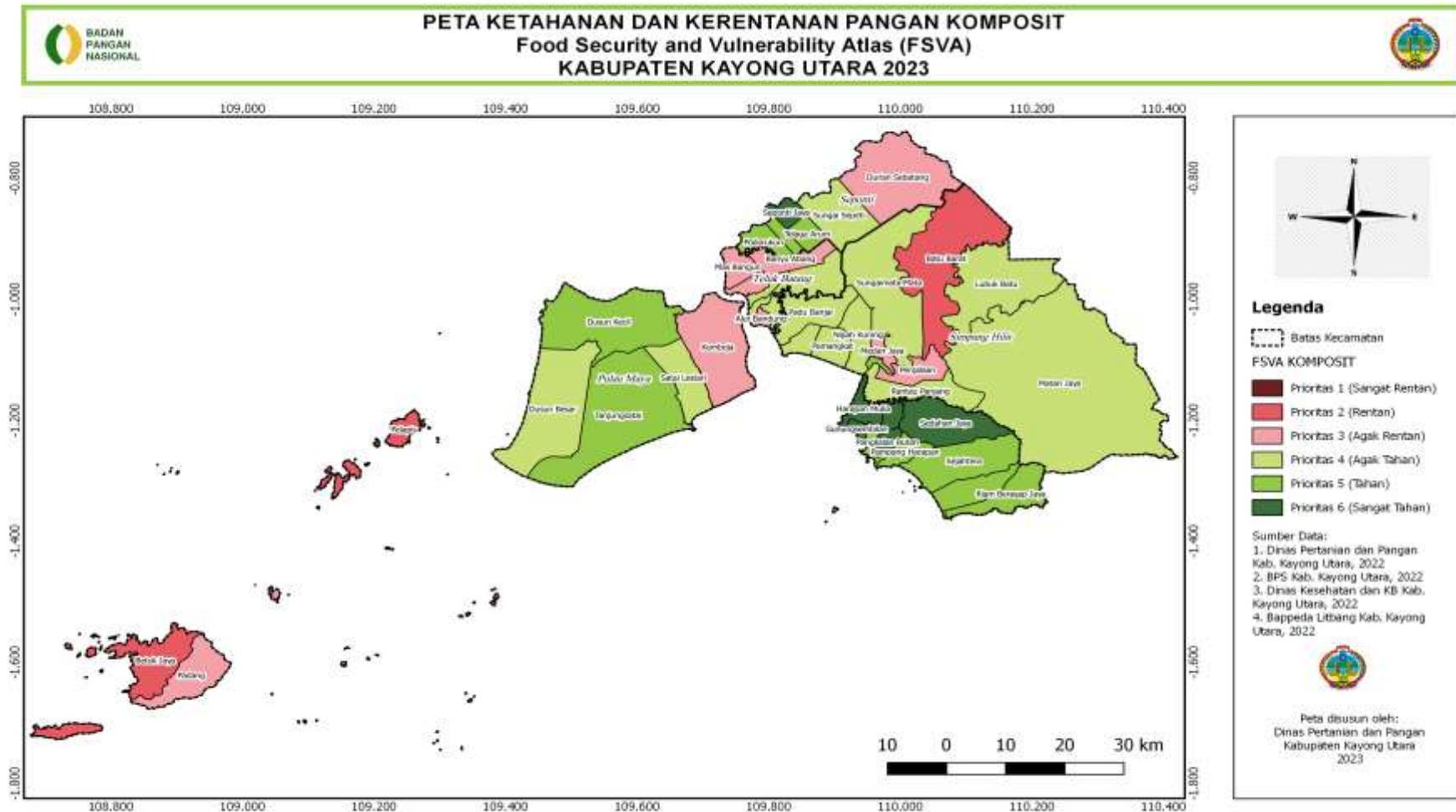
Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Simpang Hilir (2 desa), Kecamatan Teluk Batang (4 desa), Kecamatan Pulau Maya (1 desa), Kecamatan Seponti (1 desa), dan Kecamatan Kepulauan Karimata (1 desa) (Gambar 5.2).



Gambar 5.1.2 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 3

Tabel 5.1.2 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Komposit

No.	Nama Kec	Kode Desa	Nama Desa	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMPOSIT
1	SUKADANA	6111012001	SUTRA	71,27	7	5
2	SUKADANA	6111012002	PANGKALAN BUTON	72,59	6	6
3	SUKADANA	6111012003	SEJAHTERA	69,71	9	5
4	SUKADANA	6111012004	SIMPANG TIGA	69,88	8	5
5	SUKADANA	6111012005	BENAWAI AGUNG	75,40	3	6
6	SUKADANA	6111012006	HARAPAN MULIA	72,79	5	6
7	SUKADANA	6111012007	PAMPANG HARAPAN	68,69	10	5
8	SUKADANA	6111012008	SEDAHAN JAYA	81,67	1	6
9	SUKADANA	6111012009	GUNUNG SEMBILAN	74,95	4	6
10	SUKADANA	6111012010	RIAM BERASAPJAYA	63,57	16	5
11	SIMPANG HILIR	6111022001	TELUK MELANO	65,38	14	5
12	SIMPANG HILIR	6111022002	NIPAH KUNING	48,15	31	4
13	SIMPANG HILIR	6111022003	PEMANGKAT	58,29	19	4
14	SIMPANG HILIR	6111022004	PADU BANJAR	50,21	30	4
15	SIMPANG HILIR	6111022005	PENJALAAAN	43,86	39	3
16	SIMPANG HILIR	6111022006	SUNGAI MATA-MATA	53,49	27	4
17	SIMPANG HILIR	6111022007	BATU BARAT	38,42	41	2
18	SIMPANG HILIR	6111022008	PULAU KUMBANG	54,80	24	4
19	SIMPANG HILIR	6111022009	RANTAU PANJANG	58,75	18	4
20	SIMPANG HILIR	6111022010	MATAN JAYA	52,67	29	4
21	SIMPANG HILIR	6111022011	MEDAN JAYA	44,16	37	3
22	SIMPANG HILIR	6111022012	LUBUK BATU	58,21	20	4
23	TELUK BATANG	6111032001	MAS BANGUN	43,04	40	3
24	TELUK BATANG	6111032002	ALUR BANDUNG	44,06	38	3
25	TELUK BATANG	6111032003	TELUK BATANG	55,92	23	4
26	TELUK BATANG	6111032004	SUNGAI PADUAN	57,68	21	4
27	TELUK BATANG	6111032005	BANYU ABANG	45,04	36	3
28	TELUK BATANG	6111032006	TELUK BATANG SELAT	54,06	25	4
29	TELUK BATANG	6111032007	TELUK BATANG UTARA	45,16	34	3
30	PULAU MAYA	6111042001	TANJUNG SATAI	68,49	11	5
31	PULAU MAYA	6111042002	KEMBOJA	45,07	35	3
32	PULAU MAYA	6111042003	DUSUN KECIL	61,72	17	5
33	PULAU MAYA	6111042004	DUSUN BESAR	53,14	28	4
34	PULAU MAYA	6111042006	SATAI LESTARI	53,72	26	4
35	SEPONTI	6111052001	SEPONTI JAYA	78,27	2	6
36	SEPONTI	6111052002	TELAGA ARUM	64,24	15	5
37	SEPONTI	6111052003	WONOREJO	65,63	13	5
38	SEPONTI	6111052004	PODO RUKUN	67,81	12	5
39	SEPONTI	6111052005	SUNGAI SEPETI	57,34	22	4
40	SEPONTI	6111052006	DURIAN SEBATANG	45,52	33	3
41	KEPULAUAN KARIMATA	6111062001	PELAPIS	38,03	42	2
42	KEPULAUAN KARIMATA	6111062002	BETOK JAYA	36,84	43	2
43	KEPULAUAN KARIMATA	6111062003	PADANG	45,68	32	3



Gambar 5.1.2 Peta Komposit Ketahanan dan Kerawanan Pangan

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) Rasio Lahan Pertanian, (2) Rasio Penduduk Tidak Sejahtera, dan (3) Rasio Akses Jalan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Rasio Penduduk Tidak Sejahtera, (2) Rasio Lahan Pertanian, dan (3) Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan.

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- Desa-desanya prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Seponti
- Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- Desa-desanya di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

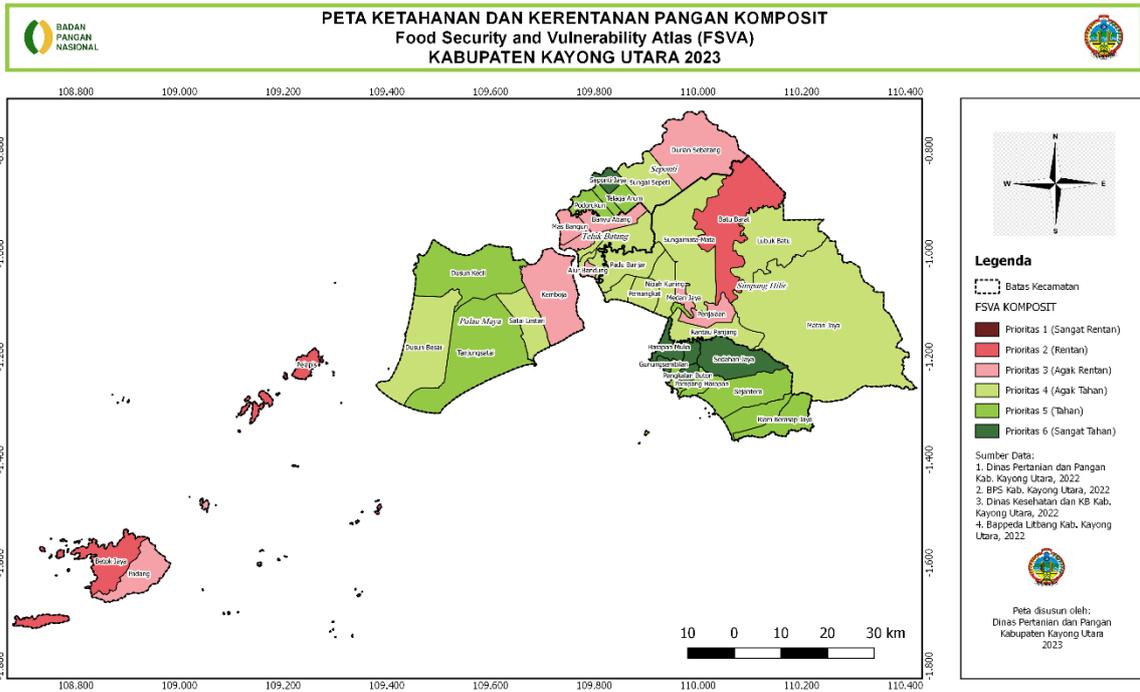
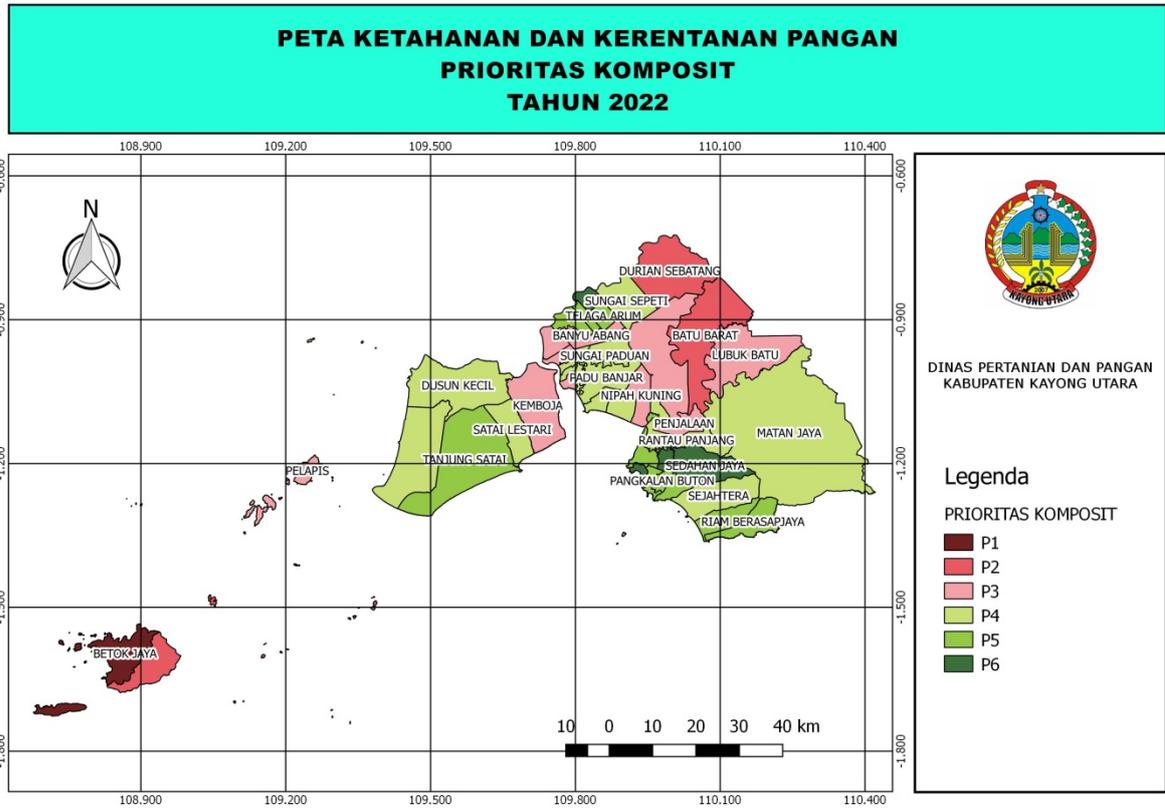


Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

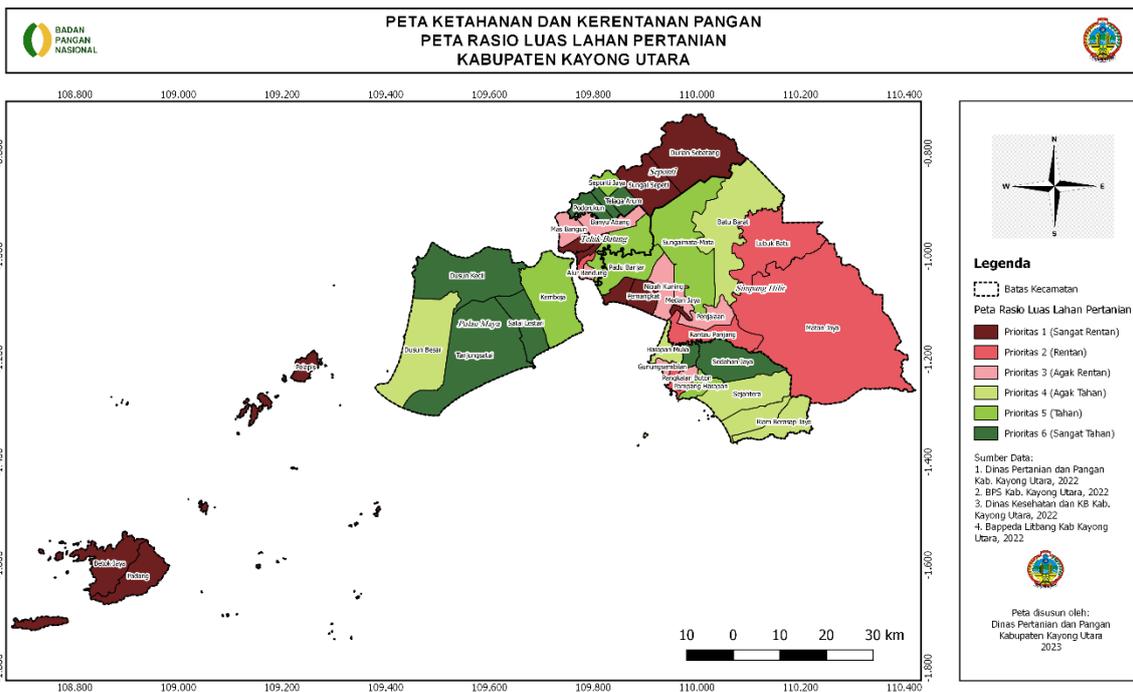
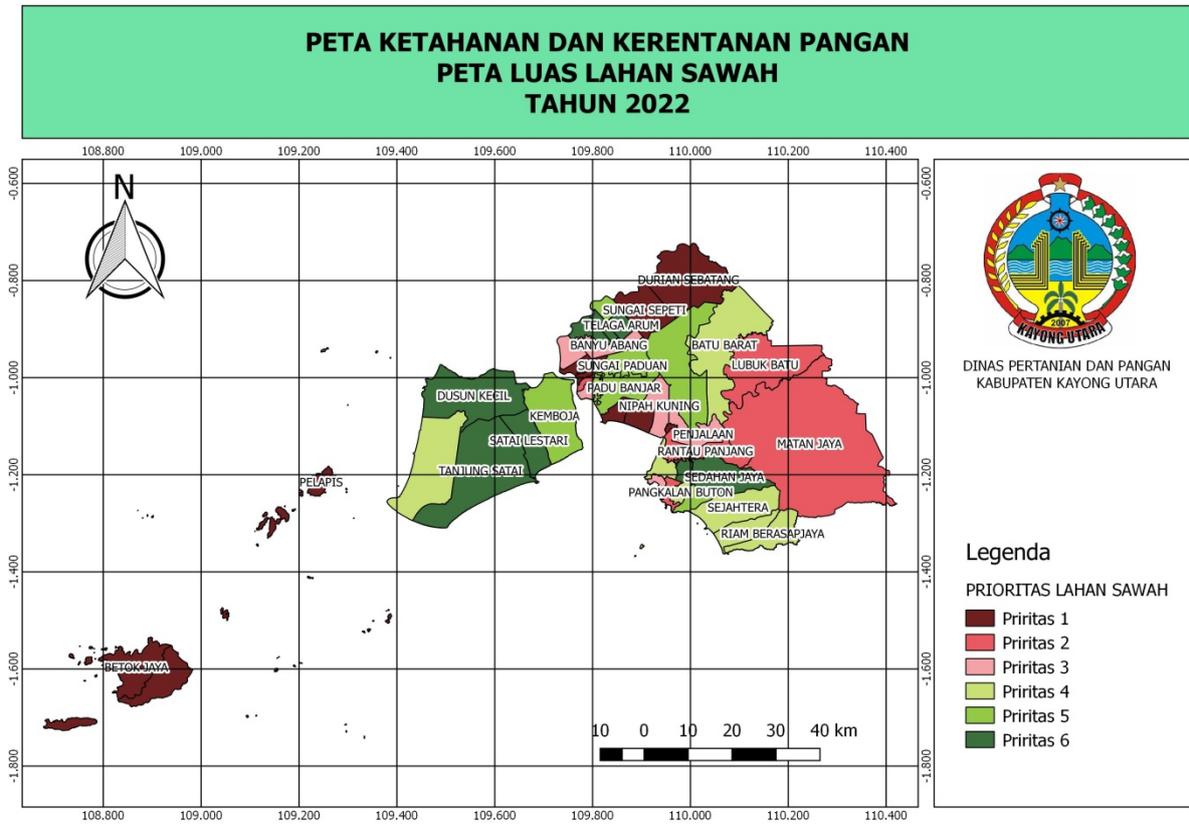
- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Penguatan kebijakan untuk mempertahankan ketersediaan lahan pertanian produktif untuk mengendalikan lajunya alih fungsi lahan pertanian, sosialisasi dan penyuluhan untuk peningkatan produksi pangan
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Penambahan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyedia pangan
- e. Peningkatan akses jalan yang memadai dan penyediaan fasilitas air bersih/air layak pakai
- f. Penyediaan tenaga kesehatan.

LAMPIRAN
PETA KETAHANAN PANGAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2022 dan 2023

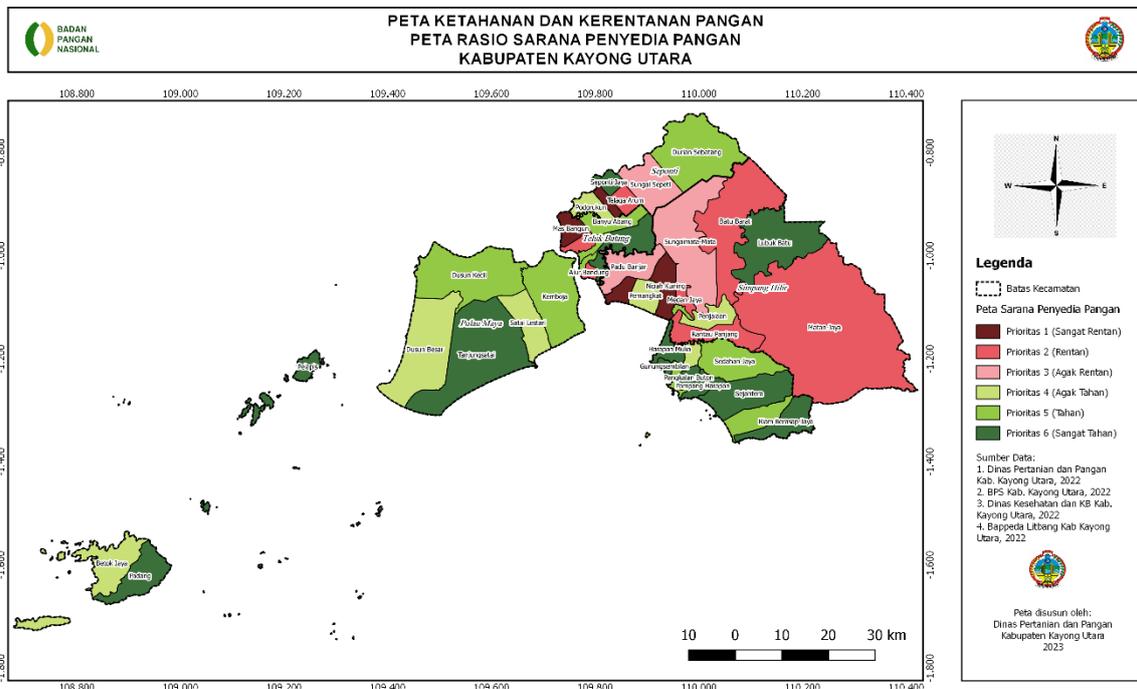
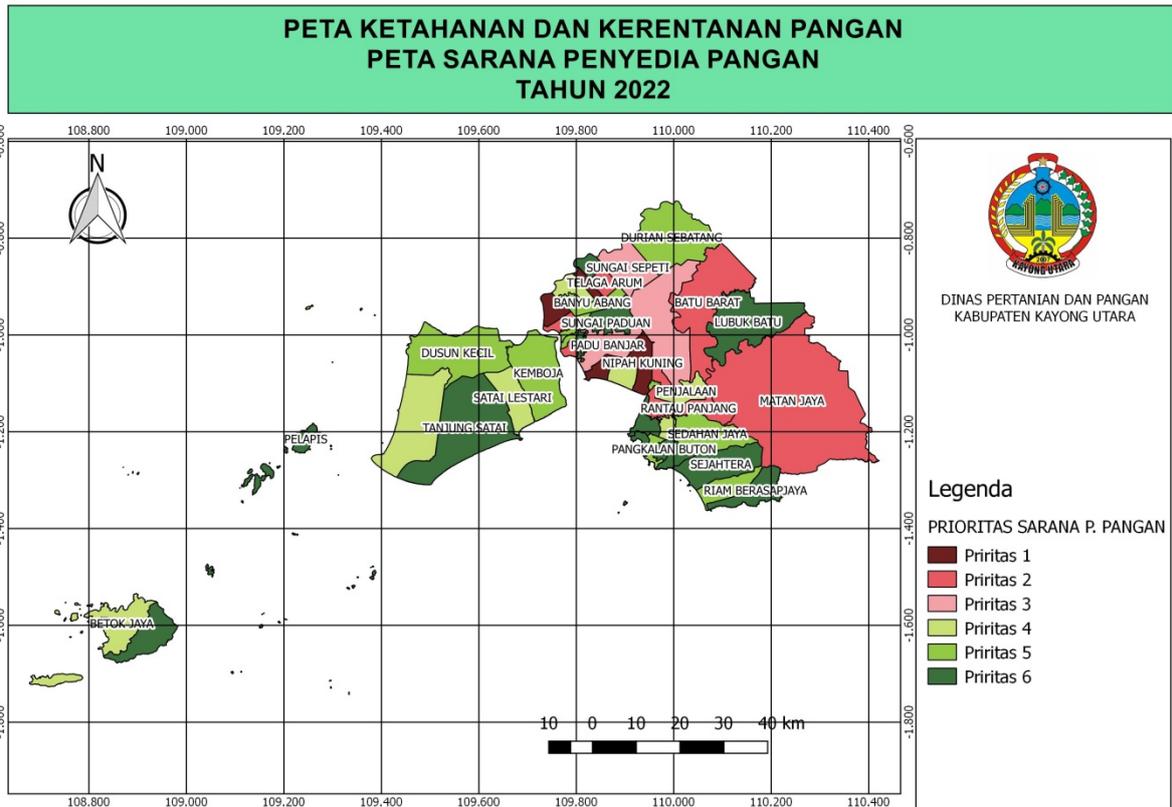
Lampiran 1. PETA KOMPOSIT KABUPATEN KAYONG UTARA



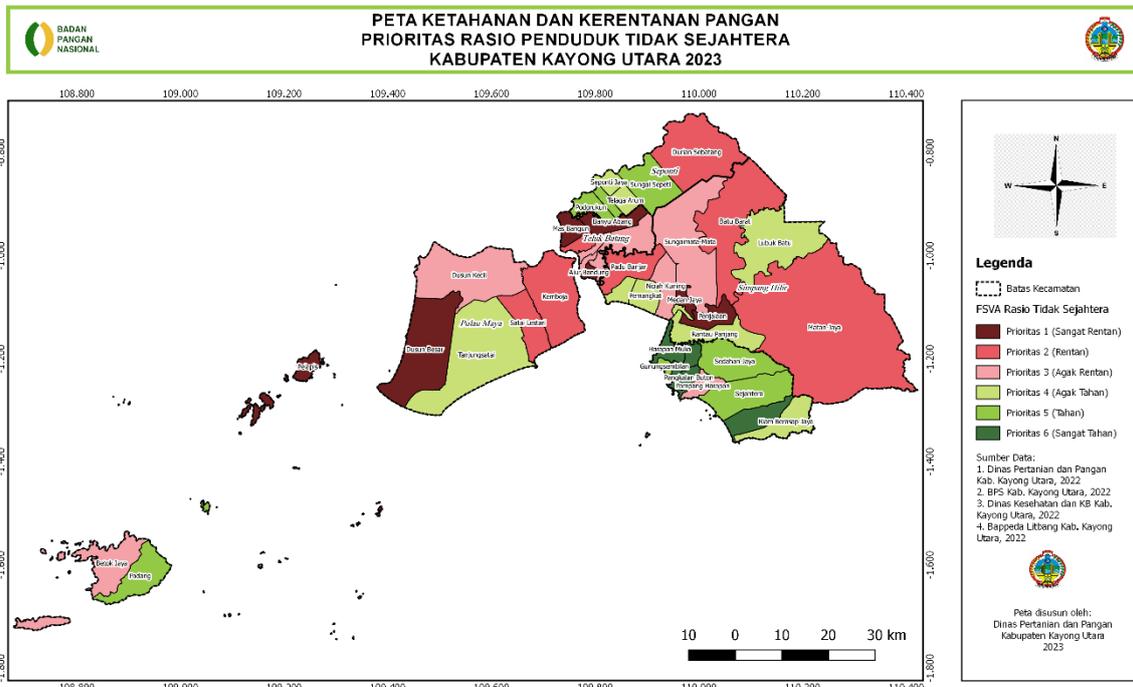
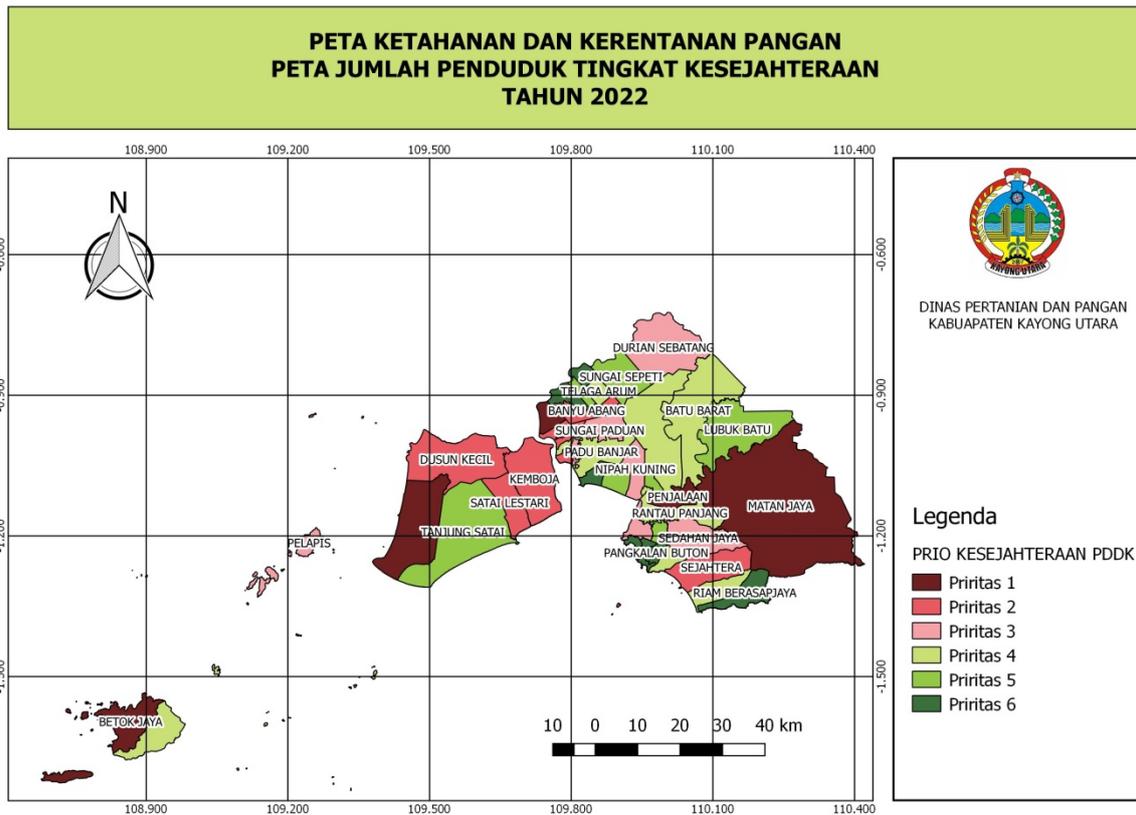
Lampiran 2. PETA LUAS LAHAN BAKU SAWAH



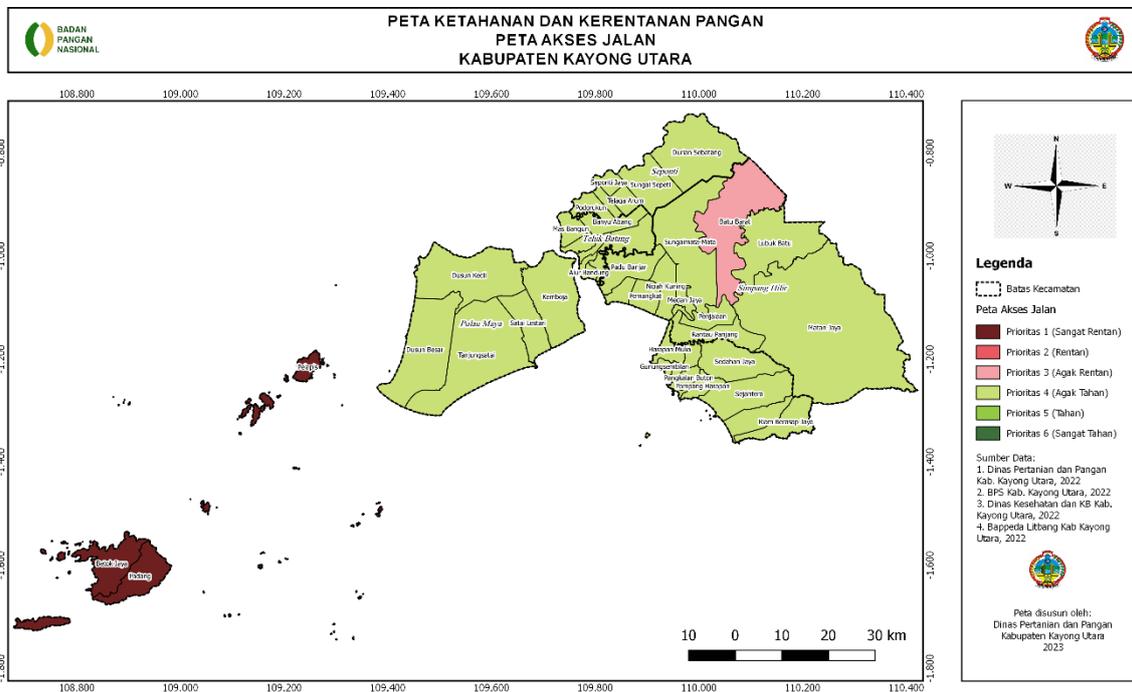
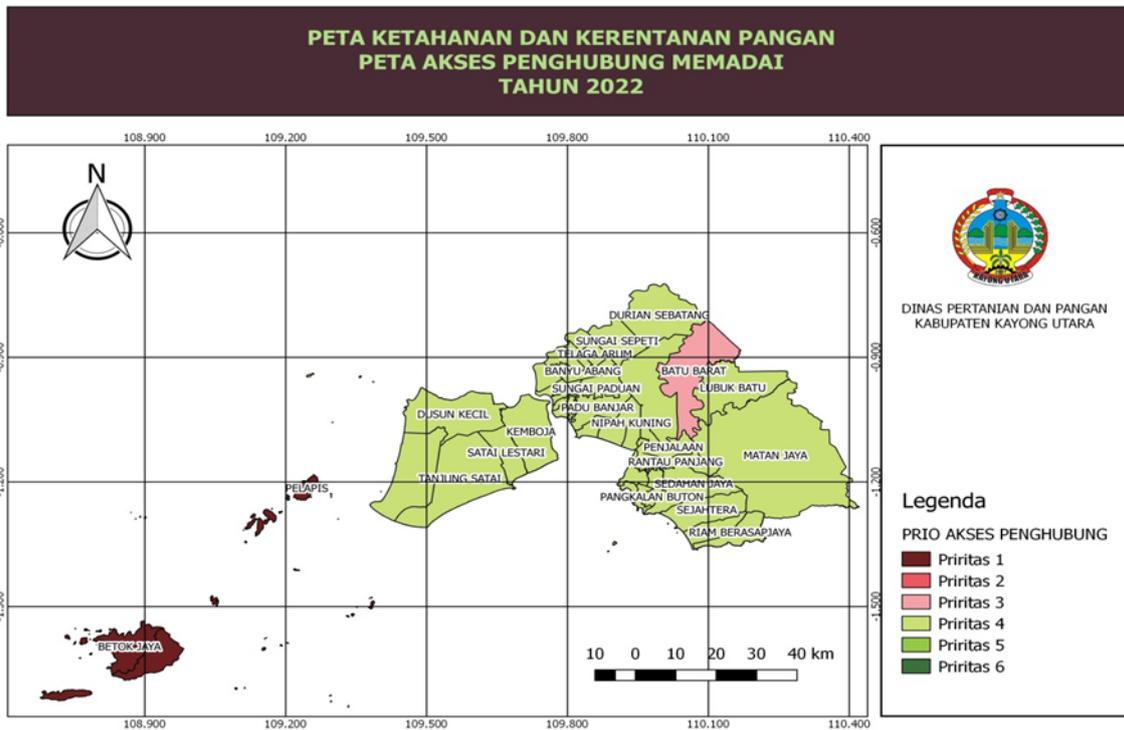
Lampiran 3. PETA SARANA DAN PRASARANA



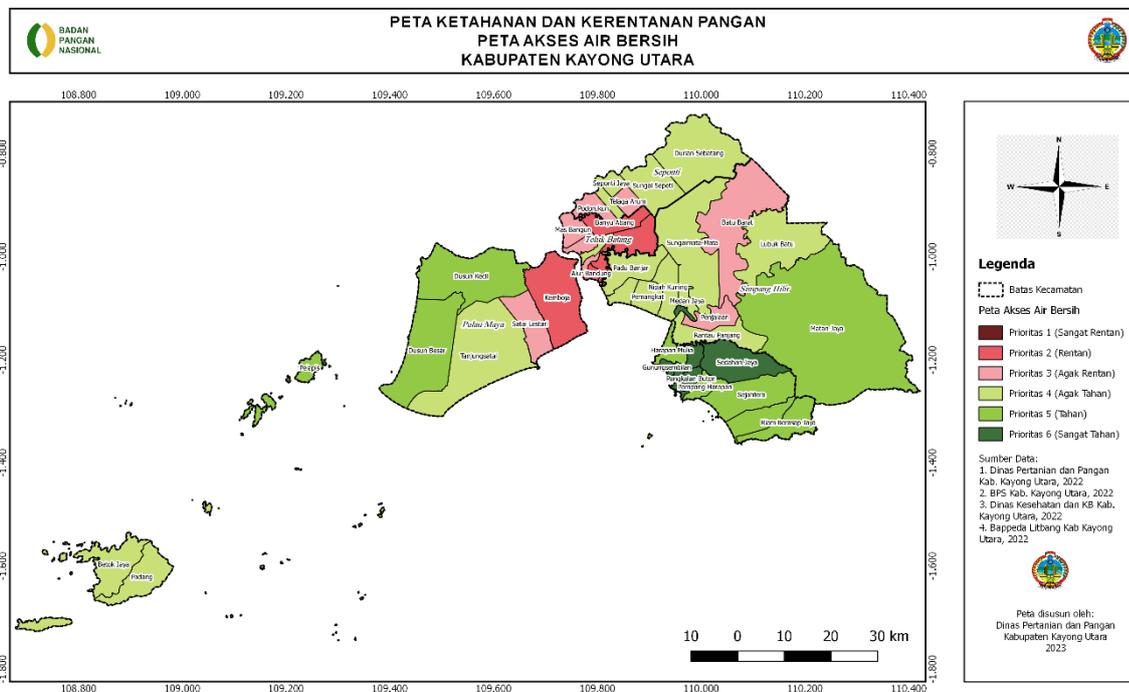
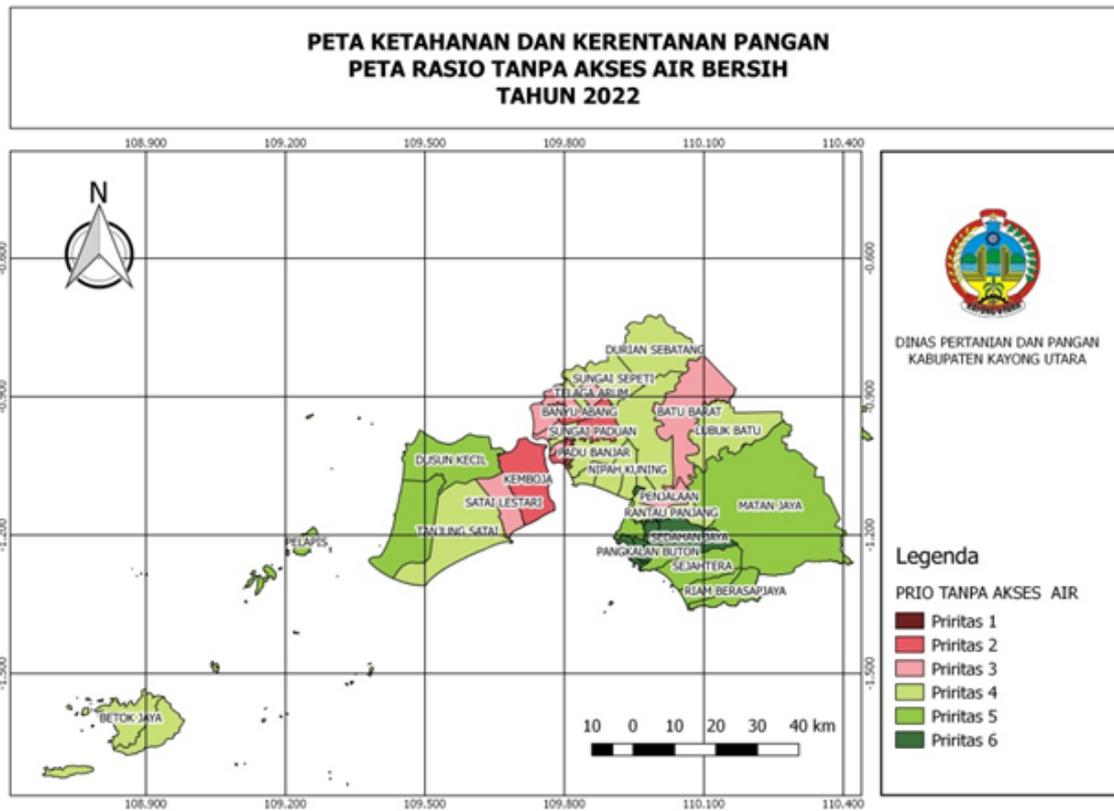
Lampiran 4. PETA TINGKAT KESEJAHTERAAN PENDUDUK



Lampiran 5. PETA AKSES JALAN

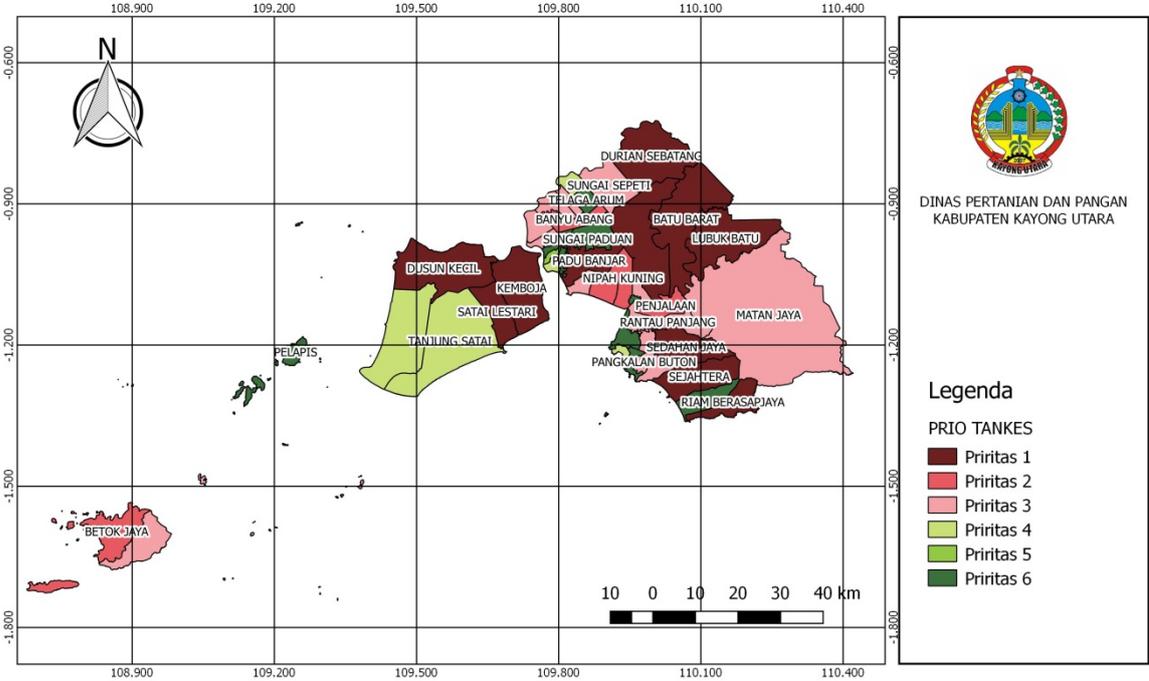


Lampiran 6. PETA TANPA AKSES AIR BERSIH



Lampiran 7. PETA JUMLAH TENAGA KESEHATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PETA TANKES TERHADAP JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PETA JUMLAH TENAGA KESEHATAN KABUPATEN KAYONG UTARA

